

**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN USAHA BUMN**

NOTA DINAS

NOMOR: AK.03.01/161/D.I.M.EKON.1/07/2026

Yth : Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama
Dari : Sekretaris Deputy
Hal : Penyampaian Laporan Kinerja Deputy I Triwulan II T.A 2026
Tanggal : 14 Juli 2026
Lampiran : 1 (satu) berkas

Dalam rangka implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bersama ini kami sampaikan Laporan Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Triwulan II T.A 2026 untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya. Adapun dokumen pendukung Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dapat diakses pada tautan berikut: <https://bit.ly/BuktidukungLapkinD1TW2>.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Deputy



Muhammad Saifulloh

Tembusan Yth.:
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN.

LAPORAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2026
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA
BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)

A. Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026

Hasil pengukuran kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1.
Ringkasan Capaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha
BUMN Triwulan II Tahun 2026

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2026	Target TW II 2026	Realisasi TW II	Capaian (%)
I	<i>Sasaran Program 1. Terwujudnya Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang Berkualitas</i>					
1.1	Jumlah Realisasi Belanja Modal BUMN	Triliun	248,30	100,55	100,55	100
1.2	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan KUR	Persen	82	40	73,02	120
1.3	Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan Kredit Program KUA, KIPK, dan KPP	Persen	80	40	100	120
1.4	Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan KUR Pasca Bencana	Persen	80	40	40	100
1.5	Persentase Penyelesaian Penugasan Pemerintah	Persen	80	20	20	100
II	<i>Sasaran Program 2. Terwujudnya Tingkat Inflasi pada Kisaran Sasaran</i>					
2.1	Tingkat Inflasi	Persen	2,5 ± 1	2,5 ± 1	3,34	100
III	<i>Sasaran Program 3. Terwujudnya Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah</i>					
3.1	Persentase Jumlah Pemerintah Daerah yang Masuk Kategori Digital	Persen	92,5	91,5	93,6	102
IV	<i>Sasaran Program 4. Terjaganya Kualitas Pengelolaan Kebijakan Stimulus yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi</i>					
4.1	Persentase Efektivitas Penyelesaian Kebijakan Stimulus Ekonomi	Persen	80	80	100	125
V	<i>Sasaran Program 5. Terwujudnya Kebijakan Pengembangan BUMN dan Stabilitas Ekonomi yang Berkualitas</i>					

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2026	Target TW II 2026	Realisasi TW II	Capaian (%)
5.1	Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN	Indeks	3 dari 4	3 dari 4	2	66,67
5.2	Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Inflasi, Stimulus Ekonomi, Digitalisasi Daerah, dan Inovasi Pembiayaan Daerah	Indeks	3 dari 4	3 dari 4	2	66,67
VI Sasaran Program 6. Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang Berkualitas						
6.1	Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN	Indeks	3 dari 4	3 dari 4	3	100
VII Sasaran Program 7. Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang Berkualitas						
7.1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RB) Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN	Persen	92	45	54,5	120

Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

1 Sasaran Program 1: Terwujudnya Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Program 1: Terwujudnya Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian tiga indikator kinerja yaitu:

1. Jumlah Realisasi Belanja Modal BUMN
2. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan KUR
3. Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan Kredit Program KUA, KIPK, dan KPP
4. Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan KUR Pasca Bencana
5. Persentase Penyelesaian Penugasan Pemerintah

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1. Jumlah Realisasi Belanja Modal BUMN

Latar Belakang

Belanja Modal BUMN merupakan jumlah pengeluaran atau pembelian dari arus kas bersih yang digunakan untuk investasi. IKU Jumlah Realisasi Belanja Modal BUMN menunjukkan bagaimana peran BUMN dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional khususnya dari aspek investasi. Sesuai dengan Peraturan

Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026, pencapaian target pertumbuhan ekonomi tahun 2026 memerlukan investasi BUMN dengan share sekitar 5,48–5,73% disamping investasi yang dilakukan Pemerintah dan swasta. Investasi BUMN yang mendukung prioritas Pembangunan nasional diarahkan pada sektor-sektor strategis yaitu kesehatan, hilirisasi berbasis sumber daya hayati, hilirisasi berbasis tambang, hilirisasi industri berteknologi tinggi, penerapan ekonomi hijau, transisi energi, ekonomi sirkular, pembangunan digital, konektivitas, ketahanan pangan, pariwisata dan ekonomi kreatif, serta keuangan dan pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Pengukuran belanja modal BUMN penting untuk dilakukan karena merupakan indikator perusahaan dalam meningkatkan kapasitas dan perluasan bisnis, serta efisiensi operasional perusahaan. Kontribusi belanja modal BUMN yang tinggi mampu memberikan *multiplier effect* dalam menggerakkan banyak sektor ekonomi yang kemudian dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

IKU Nilai Belanja Modal menjadi elemen penting dalam mendukung kegiatan investasi yang dilakukan oleh BUMN. Berdasarkan penugasan kepada Deputy 1 terdapat IKU berupa belanja modal BUMN yang menjadi target koordinasi para Asisten Deputy sesuai dengan sektornya sebanyak 20 BUMN. Jumlah ini merupakan bagian dari total BUMN sebanyak 64 yang dikoordinasikan Badan Pengaturan BUMN. Jumlah BUMN yang dikoordinasikan dengan kriteria antara lain: merupakan BUMN dengan nilai aset besar, kontribusi terhadap pendapatan negara, BUMN yang sudah tercatat di pasar modal (*go public*), dan BUMN strategis yang belum/tidak tercatat di pasar modal. Daftar BUMN tersebut dapat disampaikan sebagai berikut:

No	Sektor	BUMN	Target (Miliar Rupiah)
1	Sektor Pariwisata dan Telekomunikasi	1. Holding Aviastar Pariwisata (InJourney)	1. 13.560,00
		2. PT Garuda Indonesia (Persero)	2. 16.650,00
		3. PT Telkom (Persero) Tbk	3. 23.460,00
2	Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	1. PT Pertamina	1. 70.886,09
		2. MIND ID	2. 6.394,52
		3. PT PLN	3. 61.009,17
		4. Pupuk Indonesia	4. 3.100,22
3	Sektor Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan	1. Holding Perkebunan	1. 13.250,40
		2. Holding Biro Klasifikasi Indonesia	2. 730,38
		3. Holding Defense	3. 1.453,37
		4. Holding Farmasi	4. 1.126,89
4	Sektor Infrastruktur dan Logistik	1. PT Hutama Karya (Persero) Tbk	1. 6.934,60
		2. PT Jasa Marga (Persero) Tbk	2. 6.884,30
		3. PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	3. 5.449,60
		4. PT Kereta Api Indonesia (Persero)	4. 7.449,30
5	Sektor Jasa Keuangan dan Bisnis	1. Bank Rakyat Indonesia	1. 3.027,68
		2. Mandiri	2. 2.725,00
		3. Bank Negara Indonesia	3. 1.434,00
		4. Bank Tabungan Negara	4. 1.568,66
		5. Bank Syariah Indonesia	5. 1.205,08

Adapun target IKU Nilai Belanja Modal BUMN pada tahun 2026 ditetapkan sebesar 248,30 Triliun. Target tersebut ditetapkan berdasarkan hasil dialog kinerja dan juga koordinasi dengan Kementerian BUMN dan BUMN terkait tentang rencana belanja modal BUMN yang akan dilaksanakan pada tahun 2026.

Perhitungan IKU Belanja Modal BUMN merupakan akumulasi nilai belanja modal beberapa BUMN yang memenuhi kriteria, dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Nilai Belanja Modal BUMN} = C_1 + C_2 + C_3 + \dots + C_n$$

Keterangan:

C₁: belanja modal BUMN ke-1

C₂: belanja modal BUMN ke-2

C₃: belanja modal BUMN ke-3

C_n: belanja modal BUMN ke-n

Hasil Pengukuran Kinerja

Target IKU Nilai Belanja Modal BUMN pada tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp248,30 Triliun berdasarkan hasil dialog kinerja serta koordinasi dengan Badan Pengaturan BUMN dan BUMN terkait.

Adapun target triwulan ditetapkan menyesuaikan persentase proyeksi realisasi dari Kementerian BUMN (akumulatif) dengan rincian sebagai berikut:

Periode	Target (Rp)
s.d. Triwulan I	46,81 T
s.d. Triwulan II	100,55 T
s.d. Triwulan III	152,86 T
s.d. Triwulan IV	248,30 T

Sehubungan belum selesainya konsolidasi oleh BP BUMN terkait capaian belanja modal Triwulan II, sementara realisasi capaian menggunakan angka target TW II untuk kemudian dilakukan pemutakhiran data.

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
1.1 Belanja Modal (Capex) BUMN	Triliun Rupiah	100,55	100,55*	100

* angka proyeksi Capex Triwulan II 2026

Mempertimbangkan capaian belanja modal BUMN sampai dengan Triwulan II serta upaya yang dilakukan, maka target belanja modal BUMN hingga akhir tahun 2026 diproyeksikan dapat tercapai.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

1.1 Belanja Modal (Capex) BUMN			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan

1.	Monitoring dan Evaluasi Realisasi Belanja Modal (Capex) TW I bersama BUMN	Terlaksana	Surat Deputi I kepada Deputi Keuangan dan Manajemen Risiko BP BUMN Nomor: T/BUM.01/134/D.I.M.EKON/07/2026, tanggal 9 Juli 2026, hal Permintaan Data Target Realisasi Capex BUMN 2026 dan Realisasi Capex BUMN Triwulan II 2026
2.	Koordinasi penyelesaian isu strategis yang menghambat realisasi belanja modal TW II bersama BUMN	Terlaksana	Telah dilakukan Rapat Koordinasi oleh Asdep teknis, diantaranya: - Rapat Pembahasan Pembangunan dan Penguatan Infrastruktur Storage Minyak PT Pertamina pada tanggal 12 Januari 2026. - Telah dilaksanakan rapat bersama Bappenas dan K/L Terkait Proyek Mobil Nasional

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya di antaranya pelaksanaan kegiatan yang mengoptimalkan ruang rapat kantor dan metode daring/hybrid menggunakan video conference. Proyeksi efisiensi diperkirakan bisa mencapai Rp25.000.000,- untuk setiap kegiatan yang sebelumnya dilaksanakan dengan paket meeting. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan koordinasi lain yang sifatnya lebih strategis dan insidentil pada periode berikutnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Realisasi belanja modal pada Triwulan II 2026, berada dibawah target dari yang telah ditetapkan. Hal ini diakibatkan karena adanya penataan ulang yang dilakukan oleh Danantara yang menyebabkan terhambatnya persetujuan anggaran-anggaran besar BUMN yang diberikan untuk pelaksanaan belanja modal. Pada sektor infrastruktur misalnya, tidak tercapainya target dipengaruhi oleh pergeseran fokus pembangunan Pemerintah dari pembangunan infrastruktur secara masif menjadi pembangunan infrastruktur untuk program-program penting yang langsung menyentuh masyarakat bawah. Hal ini berdampak kepada turunnya permintaan pembangunan modal oleh BUMN yang tercermin pada realisasi TW II 2026 ini. Ketidakpastian perekonomian, khususnya terkait nilai kurs mata asing dan suku bunga, turut menyebabkan BUMN masih melakukan *wait and see* dan menyiapkan langkah strategis yang tepat untuk menyikapi kondisi-kondisi tersebut.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan II tahun 2026, rekomendasi/upaya perbaikan demi tercapainya target kinerja adalah perlu dilakukan peningkatan intensitas koordinasi dan sinkronisasi secara langsung dengan BUMN serta optimalisasi sistem pendataan realisasi capex secara

triwulanan, termasuk validasi dan analisis tren pertumbuhan capex berdasarkan sektor dan kelompok BUMN. Upaya pemetaan masalah dan hambatan per BUMN juga akan diperkuat sebagai dasar penyusunan intervensi kebijakan percepatan realisasi capex.

1.2. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan KUR

Latar Belakang

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) diluncurkan pada November 2007 berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. KUR bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif, meningkatkan kapasitas daya saing UMKM, dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta penyerapan tenaga kerja.

IKU Tingkat Efektivitas Pelaksanaan KUR menunjukkan bagaimana peran BUMN dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional khususnya dari aspek penyediaan pembiayaan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Program KUR didukung BUMN perbankan selaku lembaga keuangan penyedia pembiayaan serta BUMN penjaminan selaku perusahaan penjamin KUR. Dari sisi lembaga keuangan penyalur KUR, BUMN perbankan merupakan penyalur utama KUR disamping penyaluran yang dilakukan lembaga keuangan lainnya. Selain itu BUMN yang bergerak di bidang penjaminan berperan dalam keberhasilan pelaksanaan mitigasi risiko kredit macet KUR melalui penjaminan program KUR.

Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM menetapkan target penyaluran KUR selama periode satu tahun. Target IKU pada tahun 2026 adalah tingkat efektivitas penyaluran KUR sebesar 80%. Indikator efektivitas penyaluran KUR terdiri dari capaian penyaluran KUR sektor produksi, debitur KUR baru, debitur KUR graduasi/naik kelas, dan realisasi penyaluran KUR.

Indikator Tingkat Efektivitas Penyaluran KUR

No	Indikator	Definisi	Bobot
1	Penyaluran KUR sektor produksi	Penyaluran KUR pada kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang dan/atau jasa diluar sektor perdagangan.	20%
2	Debitur baru KUR	Debitur yang baru pertama kali memperoleh pembiayaan KUR	15%
3	Debitur KUR Graduasi	Debitur yang mengakses kembali KUR dengan nominal pinjaman yang lebih besar dari pinjaman sebelumnya, baik dalam satu skema maupun antar skema; dan Eks Debitur KUR yang mengakses kredit komersial.	5%
4	Realisasi Penyaluran KUR	Jumlah nominal KUR yang disalurkan kepada debitur	60%

Sumber: Manual IKU Deputi I (2026)

Perhitungan dapat dijelaskan lebih lanjut dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Efektivitas Penyaluran KUR} = (20\% \times \text{capaian penyaluran KUR sektor produksi}) + (15\% \times \text{capaian debitur KUR baru}) + (5\% \times \text{capaian Debitur KUR graduasi/naik kelas}) + (60\% \times \text{realisasi penyaluran KUR})$$

Keterangan:

1. Penyaluran KUR sektor produksi
 - Perhitungan Realisasi Sektor Produksi adalah porsi penyaluran KUR di sektor produksi dibandingkan dengan total penyaluran KUR selama periode waktu tertentu.
 - Capaian Sektor Produksi Tahunan : $\text{Realisasi Tahunan} / \text{Target Tahunan} \times 100\%$
 - Capaian Sektor Produksi Triwulanan : $\text{Realisasi Triwulanan} / \text{Target Triwulanan} \times 100\%$
 - Bobot yang diperoleh : $\text{Capaian} \times 20\%$
 - Maksimal capaian bobot yang diperoleh sebesar 20%
2. Debitur baru KUR
 - Perhitungan Debitur baru KUR adalah porsi jumlah debitur baru dibandingkan dengan total debitur KUR selama 1 (satu) tahun.
 - Capaian Debitur KUR Baru : $\text{Realisasi} / \text{Target} \times 100\%$
 - Bobot yang diperoleh : $\text{Capaian} \times 15\%$
 - Maksimal capaian bobot yang diperoleh sebesar 15%
3. Debitur Graduasi/Naik Kelas
 - Debitur graduasi/naik kelas adalah porsi jumlah debitur graduasi dibandingkan dengan total debitur KUR selama 1 (satu) tahun.
 - Capaian Debitur Graduasi/Naik Kelas : $\text{Realisasi} / \text{Target} \times 100\%$
 - Bobot yang diperoleh : $\text{Capaian} \times 5\%$
 - Maksimal capaian bobot yang diperoleh sebesar 5%
4. Realisasi Penyaluran KUR
 - Realisasi Penyaluran KUR adalah jumlah realisasi penyaluran KUR dibandingkan dengan target penyaluran KUR selama 1 (satu) tahun.
 - Capaian Realisasi Penyaluran KUR : $\text{Realisasi} / \text{Target} \times 100\%$
 - Bobot yang diperoleh : $\text{Capaian} \times 60\%$
 - Maksimal capaian bobot yang diperoleh sebesar 60%

Adapun target dari masing-masing indikator sebagai berikut:

Target Indikator Tingkat Efektivitas Penyaluran KUR

Indikator	Target				
	Tahunan	TW I	TW II	TW III	TW IV
Penyaluran KUR sektor produksi	54%	54%	54%	54%	54%
Debitur baru KUR	40%	10%	20%	30%	40%
Debitur KUR Graduasi	20%	5%	10%	15%	20%
Realisasi Penyaluran KUR (Rp)	251,17 T	62,79 T	125,58 T	188,37 T	251,17 T
Tingkat Efektivitas Penyaluran KUR	82%	20%	40%	60%	82%

Sumber: Manual IKU Deputi I (2026)

Hasil Pengukuran Kinerja

Target IKU Tingkat Efektivitas Penyaluran KUR pada tahun 2026 adalah sebesar 82% ditetapkan berdasarkan Dialog Kinerja. Adapun target tiap triwulan ditetapkan sebesar masing-masing 20% untuk Triwulan I s.d. III, dan 22% untuk Triwulan IV.

Hingga Triwulan II Tahun 2026, tingkat efektivitas penyaluran KUR yang telah terealisasi sebesar 73,02% atau mencapai 182,55% dari target Triwulan II tahun 2026 sebesar 20% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
1.2 Tingkat Efektivitas Penyaluran KUR	Persen	40	73,02	120

Perhitungan dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Bobot
Penyaluran KUR sektor produksi (20%)	54%	64,44%	100%	20%
Debitur baru KUR (15%)	10%	47,30%	100%	15%
Debitur KUR Graduasi (5%)	5%	21,57%	100%	5%
Realisasi Penyaluran KUR (60%)	251,17 T	149,38 T	55,04%	33,02%
Tingkat Efektivitas Penyaluran KUR				73,02%

Capaian kinerja pada Triwulan II Tahun 2026 didukung oleh pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi yang efektif dengan para pemangku kepentingan, sehingga target yang ditetapkan pada Triwulan II Tahun 2026 dapat tercapai.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

1.2 Tingkat Efektivitas Penyaluran KUR			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1.	Sosialisasi Permenko tentang Pedoman Pelaksanaan KUR	Terlaksana	- Telah terlaksananya FGD terkait Permenko KUR nomor 1 dan 2 tahun 2026 pada tanggal 8 Mei 2026 - Telah terlaksananya Sosialisasi Penyaluran KUR 2026 BPD Jawa Tengah pada 10 April 2026
2.	Penyusunan Kebijakan KUR Semester II 2026	Terlaksana	Terlaksananya Rapat Teknis Pembahasan Rakomjak dan Review Usulan PNM pada tanggal 29 Mei 2026

3.	Rapat Koordinasi Optimalisasi Penyaluran KUR 2026	Terlaksana	Pertemuan dengan Deputi Akuntan Negara BPKP Membahas Laporan KUR dari BPKP pada tanggal 14 April 2026
4.	Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM terkait pembiayaan bagi UMKM Semester II 2026	Terlaksana	Telah terlaksananya Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM Tingkat Eselon I pada tanggal 12 Mei 2026

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya di antaranya pelaksanaan kegiatan yang mengoptimalkan ruang rapat kantor dan metode daring/*hybrid* menggunakan *video conference*. Proyeksi efisiensi diperkirakan bisa mencapai Rp25.000.000,- untuk setiap kegiatan yang sebelumnya dilaksanakan dengan paket meeting. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan koordinasi lain yang sifatnya lebih strategis dan insidental pada periode berikutnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut, sebagai berikut:

1. Proses koordinasi dan sinkronisasi data membutuhkan waktu yang lebih panjang mengingat keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam penyediaan dan verifikasi data;
2. Beberapa Penyalur KUR cenderung menyalurkan KUR pada debitur eksisting.

Berdasarkan kendala serta capaian kinerja pada Triwulan II Tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan ke depannya:

1. Memperkuat koordinasi teknis dengan Kementerian/Lembaga serta stakeholder terkait;
2. Meningkatkan komunikasi efektif dalam mendorong penyaluran KUR kepada Debitur KUR baru

1.3. Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan Kredit Program KUA, KIPK, dan KPP

Latar Belakang

Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan Kredit Program KUA, KIPK, dan KPP merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan kebijakan pembiayaan pemerintah dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian/Lembaga. Kredit Program dimaksud meliputi Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan), Kredit Industri Padat Karya, dan Kredit Program Perumahan, yang diarahkan untuk memperkuat sektor-sektor prioritas pembangunan nasional, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan Kredit Program dilaksanakan melalui sinergi antara pemerintah, BUMN perbankan sebagai lembaga penyalur pembiayaan, serta lembaga penjaminan dalam rangka memperkuat mitigasi risiko dan menjaga keberlanjutan pembiayaan. Peran BUMN dalam pelaksanaan Kredit Program mencerminkan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L, khususnya dalam

mendukung peningkatan kapasitas produksi sektor pertanian, penguatan industri yang berdaya serap tenaga kerja tinggi, serta penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat.

Indikator Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan Kredit Program menunjukkan sejauh mana penyaluran kredit program telah dilaksanakan secara efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan target kebijakan yang ditetapkan. Keberhasilan pelaksanaan kredit program diukur melalui tingkat efektivitas penyaluran kredit, yaitu perbandingan antara realisasi penyaluran dengan target tahunan yang ditetapkan oleh pemerintah atau komite kebijakan pembiayaan terkait, dengan tetap memperhatikan kualitas penyaluran dan kesesuaian dengan sektor prioritas.

Efektivitas penyaluran Kredit Program disusun berdasarkan beberapa komponen utama, antara lain realisasi penyaluran kredit terhadap target, penyaluran kepada sektor produktif dan prioritas, serta cakupan dan karakteristik debitur penerima manfaat. Dalam konteks Kredit Usaha Alsintan, indikator ini mencerminkan dukungan pembiayaan terhadap peningkatan produktivitas dan modernisasi sektor pertanian. Pada Kredit Industri Padat Karya, indikator ini menggambarkan kontribusi pembiayaan terhadap keberlangsungan usaha dan penyerapan tenaga kerja. Sementara itu, pada Kredit Program Perumahan, indikator ini mencerminkan dukungan pembiayaan terhadap penyediaan hunian layak dan pengurangan backlog perumahan.

Target Indikator Kinerja Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan Kredit Program ditetapkan setiap tahun dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran Renstra K/L, serta mempertimbangkan kapasitas pembiayaan, kondisi perekonomian, dan risiko pelaksanaan program. Capaian indikator ini diharapkan dapat menggambarkan keberhasilan pelaksanaan Kredit Program sebagai instrumen kebijakan fiskal dan pembiayaan yang efektif, akuntabel, serta berkontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran pembangunan dan kinerja Kementerian/Lembaga.

Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan Kredit Program KUA, KIPK, dan KPP beberapa indikator sebagai berikut:

No	Jenis Kredit Program	Indikator Capaian	Target	Bobot
1	Kredit Usaha Alsintan	Realisasi Penyaluran Kredit Usaha Alsintan	TW 1: Rp 23,31 Miliar TW 2: Rp 46,62 Miliar TW 3: Rp 69,93 Miliar TW 4: Rp 93,24 Miliar	20%
2	Kredit Industri Padat Karya	Realisasi Penyaluran Kredit Industri Padat Karya (KIPK)	TW 1: Rp 4,39 Miliar TW 2: Rp 8,79 Miliar TW 3: Rp 13,19 Miliar TW 4: Rp 17,58 Miliar	10%
3	Kredit Program Perumahan	Realisasi Kredit Program Perumahan	TW 1: Rp 2,81 Triliun TW 2: Rp 5,62 Triliun TW 3: Rp 8,43 Triliun TW 4: Rp 11,24 Triliun	70%

Perhitungan tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut dengan formula sebagai berikut:

Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan Kredit Program KUA, KIPK, dan KPP = $(20\% \times \text{Realisasi/Target Penyaluran Kredit Usaha Alsintan} \times 100\%) + (10\% \times \text{Realisasi/Target Penyaluran Kredit Industri Padat Karya} \times 100\%) + (70\% \times \text{Realisasi/Target Penyaluran Kredit Program Perumahan} \times 100\%)$

Besaran pembobotan ditetapkan berdasarkan historis realisasi penyaluran KUA, KIPK dan KPP pada tahun sebelumnya.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target Indikator Kinerja Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan Kredit Program tahun 2026 sebesar 80% dengan target tiap Triwulan ditetapkan masing-masing sebesar 20%

Hingga Triwulan II Tahun 2026, Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan Kredit Program KUA, KIPK, dan KPP yang telah terealisasi sebesar 100% atau mencapai 250% dari target Triwulan II tahun 2026 sebesar 40% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
1.3 Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan Kredit Program KUA, KIPK, dan KPP	Persen	40	100	120

Perhitungan dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Bobot
Realisasi Penyaluran Kredit Usaha Alsintan (20%)	Rp46,62 M	Rp 100,13 M	100%	20%
Realisasi Penyaluran Kredit Industri Padat Karya (10%)	Rp8,79 M	Rp99,32 M	100%	10%
Realisasi Penyaluran Kredit Program Perumahan (70%)	Rp5,62 T	Rp20,34 T	100%	70%
Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan Kredit Program KUA, KIPK, dan KPP				100%

Capaian kinerja pada Triwulan II Tahun 2026 didukung oleh pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi yang efektif dengan para pemangku kepentingan, sehingga target yang ditetapkan pada Triwulan II Tahun 2026 dapat tercapai.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

1.3 Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan Kredit Program KUA, KIPK, dan KPP			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
Penyusunan dan implementasi kredit program usaha alat dan mesin pertanian			
1.	Melaksanakan rapat koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM terkait Kebijakan KUA Semester II 2026	Terlaksana	- Telah terlaksananya Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM Tingkat Eselon I pada tanggal 12 Mei 2026 - Telah terlaksananya Rapat Koordinasi Komite Kebijakan

			level Menteri, Rapat Koordinasi terkait Optimalisasi Kredit Program Semester I Tahun 2026, pada tanggal 22 Juni 2026
2.	Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan KUA Semester I 2026	Terlaksana	Telah terlaksananya Rapat Koordinasi Kendala Penyaluran Kredit Usaha Alsintan (KUA) Subsektor Peternakan padatanggal 19 Mei 2026, atas undangan dari Undangan Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan, Kementan
Penyusunan dan implementasi kredit program kepada usaha di sektor industri padat karya (KIPK)			
1.	Melaksanakan rapat koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM terkait Kebijakan KIPK Semester II 2026	Terlaksana	- Telah terlaksananya Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM Tingkat Eselon I pada tanggal 12 Mei 2026 - Telah terlaksananya Rapat Koordinasi Komite Kebijakan level Menteri, Rapat Koordinasi terkait Optimalisasi Kredit Program Semester I Tahun 2026, pada tanggal 22 Juni 2026
2.	Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan KIPK Semester II 2026	Terlaksana	- Telah terlaksananya Rapat Tindak Lanjut Usulan Optimalisasi KIPK Pada 1 April 2026 - Telah Terlaksananya Rapat Persiapan Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Program KIPK Semester I Tahun 2026 dan Pembahasan Pemanfaatan Fitur pada Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) KIPK pada tanggal 18 Juni 2026
Penyusunan dan implementasi kredit program kepada usaha di sektor perumahan			
1.	Melaksanakan rapat koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM terkait Kebijakan KPP Semester II 2026	Terlaksana	- Telah terlaksananya Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM Tingkat Eselon I pada tanggal 12 Mei 2026 - Telah terlaksananya Rapat Koordinasi Komite Kebijakan

			level Menteri, Rapat Koordinasi terkait Optimalisasi Kredit Program Semester I Tahun 2026, pada tanggal 22 Juni 2026
2.	Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan KPP Semester I 2026	Terlaksana	- Telah terlaksana FGD Kajian Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kredit Program Perumahan (KPP) pada 11 Juni 2026 atas Undangan Direktur Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi, Kemenkeu - Telah terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kredit Program Perumahan BRI di Bandung pada 25 Juni 2026

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya di antaranya pelaksanaan kegiatan yang mengoptimalkan ruang rapat kantor dan metode daring/hybrid menggunakan *video conference*. Proyeksi efisiensi diperkirakan bisa mencapai Rp25.000.000,- untuk setiap kegiatan yang sebelumnya dilaksanakan dengan paket meeting. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan koordinasi lain yang sifatnya lebih strategis dan insidental pada periode berikutnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Penyaluran Kredit Program mengalami keterlambatan disebabkan penyesuaian kebijakan penyaluran Kredit Program;
2. Beberapa Penyalur dan Penjamin Kredit Program belum menyelesaikan Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Berdasarkan kendala serta capaian kinerja pada Triwulan II Tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan ke depannya:

1. Memperkuat koordinasi teknis dengan Kementerian/Lembaga serta stakeholder terkait;
2. Meningkatkan komunikasi efektif dalam mendorong penyaluran Kredit Program.

1.4. Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan KUR Pasca Bencana

Latar Belakang

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah Kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Program Kredit Usaha Rakyat didukung BUMN perbankan selaku lembaga keuangan penyedia pembiayaan serta BUMN penjaminan selaku perusahaan penjamin KUR. Dari sisi lembaga keuangan

penyalur KUR, BUMN perbankan merupakan penyalur utama KUR disamping penyaluran yang dilakukan lembaga keuangan lainnya.

Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan KUR Pascabencana adalah ukuran tercapainya pelaksanaan kebijakan KUR Pascabencana di wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Adapun indikator tingkat keberhasilan pelaksanaan KUR Pascabencana dinilai berdasarkan terlaksananya perlakuan khusus KUR yang terbagi ke dalam tiga periode yaitu:

1. Periode Pemetaan (berlaku sejak tanggal 24 November 2025 sampai dengan tanggal 31 Maret 2026)
2. Periode Relaksasi (berlaku sejak tanggal 1 April 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2027)
3. Periode Percepatan Pemulihan (berlaku sejak tanggal 13 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2027)

Perlakuan tingkat kepatuhan pelaksanaan terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Pedoman Pelaksanaan KUR Pascabencana, baik dari sisi substansi kebijakan maupun ketepatan waktu pelaksanaan antar periode.

Hasil Pengukuran Kinerja

IKU Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan KUR Pasca Bencana dihitung berdasarkan terlaksananya *timeline* perlakuan KUR Pascabencana sesuai dengan fase-fase yang sudah ditetapkan di permenko Pedoman Pelaksanaan KUR Pascabencana:

1. TW 1: Terlaksananya perlakuan khusus KUR Pascabencana di Periode Pemetaan yang merupakan kegiatan penundaan pembayaran pokok dan bunga tanpa ada sanksi: 20%
2. TW 2: Terlaksananya perlakuan khusus KUR Pascabencana Periode Relaksasi yang merupakan kegiatan restrukturisasi KUR debitur eksisting baik berupa suplesi dan/atau perpanjangan tenor: 40%
3. TW 3 : Terlaksananya perlakuan khusus KUR Pascabencana Periode Relaksasi yang merupakan kegiatan restrukturisasi KUR debitur eksisting baik berupa suplesi dan/atau perpanjangan tenor; dan/atau terlaksananya perlakuan khusus KUR Pascabencana periode percepatan pemulihan yang merupakan kegiatan penyaluran baru KUR dengan bunga 0% pada tahun 2026: 60%
4. TW 4 : Terlaksananya perlakuan khusus KUR Pascabencana Periode Relaksasi yang merupakan kegiatan restrukturisasi KUR debitur eksisting baik berupa suplesi dan/atau perpanjangan tenor; dan/atau terlaksananya perlakuan khusus KUR Pascabencana periode percepatan pemulihan yang merupakan kegiatan penyaluran baru KUR dengan bunga 0% pada tahun 2026: 80%

Hingga Triwulan II Tahun 2026, IKU Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan KUR Pasca Bencana yang telah terealisasi sebesar 40% atau mencapai 100% dari target Triwulan II tahun 2026 sebesar 40% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
1.4 Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan KUR Pasca Bencana	Persen	40	40	100%

Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan KUR Pasca Bencana telah sesuai dengan fase-fase yang sudah ditetapkan di permenko Pedoman Pelaksanaan KUR Pascabencana, di mana pada TW II terlaksananya perlakuan khusus KUR Pascabencana Periode Relaksasi yang merupakan kegiatan restrukturisasi KUR debitur eksisting baik berupa suplesi dan/atau perpanjangan tenor.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

1.4. Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan KUR Pasca Bencana			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1.	Melaksanakan rapat koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM terkait Kebijakan KUR Pasca bencana Semester II 2026	Terlaksana	- Telah terlaksananya Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM Tingkat Eselon I pada tanggal 12 Mei 2026 - Telah terlaksananya Rapat Koordinasi Komite Kebijakan level Menteri, Rapat Koordinasi terkait Optimalisasi Kredit Program Semester I Tahun 2026, pada tanggal 22 Juni 2026
2.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penyaluran dan Penjaminan KUR Pascabencana TW I 2026	Terlaksana	Telah melakukan Kunjungan Lapangan Pemantauan Rencana Pemulihan Pascabencana di Aceh pada 5-8 mei 2026

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pemanfaatan anggaran sesuai kebutuhan organisasi untuk mencapai target yang telah ditetapkan dengan proyeksi efisiensi mencapai Rp 100.000.000,-.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Proses koordinasi dan sinkronisasi data membutuhkan waktu yang lebih panjang mengingat keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam penyediaan dan verifikasi data;

2. Keterbatasan waktu dalam penyelenggaraan sosialisasi kebijakan KUR Pascabencana.

Berdasarkan kendala serta capaian kinerja pada Triwulan II Tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan ke depannya:

1. Memperkuat koordinasi teknis dengan Kementerian/Lembaga serta stakeholder terkait;
2. Meningkatkan komunikasi efektif dalam mendorong optimalisasi penyaluran KUR Pascabencana tahun 2026 yang efektif dan tepat sasaran

1.5. Persentase Penyelesaian Penugasan Pemerintah

Latar Belakang

Posisi Badan Usaha Milik Negara sebagai *value creator* dan *agent of development* menjadi hal yang krusial dalam mendukung prioritas pembangunan nasional. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026, BUMN diarahkan untuk meningkatkan daya saing dan kualitas sebagai agen pembangunan, peningkatan peran pada program strategis dan perintis, serta optimalisasi peran pada program tanggung jawab sosial dan lingkungan. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah kemudian memberikan berbagai penugasan kepada beberapa BUMN untuk dapat dilaksanakan pada tahun 2026.

IKU Persentase Realisasi Penyelesaian Penugasan Pemerintah kepada BUMN menggambarkan bagaimana realisasi pelaksanaan penugasan yang dapat berupa kegiatan yang ditetapkan oleh Peraturan Presiden, penugasan dari kementerian/lembaga, ataupun sebagai hasil kesepakatan. Sesuai dengan tugas dan fungsi Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN, daftar penugasan Pemerintah kepada BUMN yang dikoordinasikan dapat diuraikan sebagai berikut:

Daftar Penugasan Pemerintah kepada BUMN

No	Sektor	Penugasan
1	Sektor Pariwisata dan Telekomunikasi	1. Penurunan Harga Tiket Pesawat HBKN 2026 melalui Diskon PJ2U & PJ4U 2. Penurunan Harga Tiket Pesawat HBKN 2026 melalui diskon Fuel Surcharge (FS)
2	Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	1. Kebijakan penyediaan, penyaluran, dan pengendalian jenis JBT dan JBKP oleh Badan Penugasan pada Transportasi Kendaraan Bermotor untuk angkutan orang atau barang 2. Kebijakan pembangunan tangki penyimpanan BBM dan LPG 3. Kebijakan penyediaan, penyaluran, dan pengendalian isi ulang LPG tabung 3 Kg 4. Kebijakan penyediaan dan pendistribusian gas bumi melalui jaringan distribusi gas bumi rumah tangga dan pembangunan infrastruktur gas bumi untuk kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara 5. Kebijakan Penetapan Harga Gas Tertentu 6. Kebijakan pengembangan Kilang Existing/Refinery Development Master Plan (RDMP): RDMP Balongan, Dumai, Cilacap, Plaju dan Balikpapan 7. Kebijakan pengembangan Kilang Minyak Tuban (Ekspansi): GRR Tuban

		8. Kebijakan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan (PIK) yang terdiri dari pembangkit tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, gardu induk, dan sarana pendukung lainnya 9. Kebijakan pemenuhan kebutuhan listrik nasional yang terdiri dari program listrik pedesaan (Lindes), program bantuan pasang baru listrik (BPBL) dan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTsa).
3	Sektor Industri Manufaktur, Agro, Farmasi & Kesehatan	1. Perluasan lahan tebu 2. Peningkatan Produksi gula 3. Peningkatan Rendemen gula
4	Sektor Infrastruktur dan Logistik	1. Pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) di daerah pascabencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar 2. Penyelesaian reimbursement kepada PT KAI, PT Pelni, dan PT ASDP atas penugasan dalam pemberian diskon tarif transportasi periode Libur Nataru 2025/2026 3. Penyelesaian pembayaran biaya salur kepada PT Pos Indonesia atas penugasan untuk penyaluran BLTS Kesra Tahun 2025 4. Penyelesaian reimbursement kepada PT KAI, PT Pelni, dan PT ASDP atas penugasan dalam pemberian diskon tarif transportasi periode HBKN Ramadan dan Idulfitri 2026
5	Sektor Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis	1. Penyaluran Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian, Penyaluran Kredit Industri Padat Karya, dan Penyaluran Kredit Program Perumahan 2. Pelaksanaan Penugasan Pengembangan Ekosistem Usaha Bullion

Perhitungan capaian dapat dijelaskan lebih lanjut dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Persentase Realisasi Penugasan} = \frac{\text{Total Penugasan Pemerintah yang Diselesaikan}}{\text{Total Penugasan Pemerintah yang Diberikan}} \times 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target IKU Persentase Realisasi Penugasan Pemerintah adalah sebesar 80% yang ditetapkan berdasarkan Dialog Kinerja serta koordinasi dengan Kementerian BUMN dan BUMN. Indikator Penyelesaian Penugasan dijelaskan lebih lanjut pada Manual IKU masing-masing Asisten Deputi pengampu penugasan.

Adapun target triwulan II ditetapkan sebesar 40% dengan menggunakan metode prorata untuk memastikan target kinerja terdistribusi merata sepanjang tahun, sehingga pencapaian target kinerja dapat lebih terukur dan realistis.

Hingga Triwulan II Tahun 2026, Persentase Penyelesaian Penugasan Pemerintah yang telah terealisasi **sebesar 55% (11 penugasan selesai dari total 20 penugasan)** atau tercapai 100% dari target Triwulan II tahun 2026 sebesar 40% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
1.5 Persentase Penyelesaian Penugasan Pemerintah	Persen	40	55	120%

Rincian penugasan pemerintah yang telah selesai sebagaimana berikut:

Sektor	Penugasan
Sektor Pariwisata dan Telekomunikasi	1. Penurunan Harga Tiket Pesawat HBKN 2026 melalui Diskon PJ2U & PJ4U 2. Penurunan Harga Tiket Pesawat HBKN 2026 melalui diskon Fuel Surcharge (FS)
Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	1. Kebijakan penyediaan, penyaluran, dan pengendalian jenis JBT dan JBKP oleh Badan Penugasan pada Transportasi Kendaraan Bermotor untuk angkutan orang atau barang 2. Kebijakan pembangunan tangki penyimpanan BBM dan LPG 3. Kebijakan penyediaan, penyaluran, dan pengendalian isi ulang LPG tabung 3 Kg 4. Kebijakan penyediaan dan pendistribusian gas bumi melalui jaringan distribusi gas bumi rumah tangga dan pembangunan infrastruktur gas bumi untuk kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara. 5. Kebijakan pengembangan Kilang Existing/Refinery Development Master Plan (RDMP): RDMP Balongan, Dumai, Cilacap, Plaju dan Balikpapan. 6. Kebijakan pengembangan Kilang Minyak Tuban (Ekspansi): GRR Tuban. 7. Kebijakan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan (PIK) yang terdiri dari pembangkit tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, gardu induk, dan sarana pendukung lainnya
Sektor Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis	1. Penyaluran Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian, Penyaluran Kredit Industri Padat Karya, dan Penyaluran Kredit Program Perumahan 2. Pelaksanaan Penugasan Pengembangan Ekosistem Usaha Bullion

IKU ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan peran BUMN untuk mendukung agenda pembangunan ekonomi nasional dan akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan keberlanjutan usaha.

Mempertimbangkan persentase realisasi penugasan pemerintah kepada BUMN sampai dengan Triwulan II serta upaya yang dilakukan, maka target persentase penyelesaian penugasan pemerintah kepada BUMN hingga akhir tahun 2026 diproyeksikan dapat tercapai.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

1.5 Persentase Penyelesaian Penugasan Pemerintah

No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1.	Monitoring kesiapan giling tebu dalam rangka percepatan swasembada gula	Terlaksana	Telah dilakukan Rapat Koordinasi dengan Kementerian/Lembaga (K/L) pada tanggal 16 April 2026 terkait proyeksi produksi Gula Kristal Putih (GKP) atau Gula Konsumsi Nasional.
2.	Monitoring progres pembentukan Indonesia Bullion Market Association	Terlaksana	Telah terlaksana Rapat Harga Acuan Emas dan IBMA dengan PT Pegadaian dan PT BSI pada 19 Mei 2026.

Upaya Nyata Untuk Mencapai Kinerja

Koordinasi intensif dengan Kementerian BUMN, Kementerian Pertanian, Kantor Staf Kepresidenan, dan PT Perkebunan Nusantara III/ PT Sinergi Gula Nusantara untuk melakukan update berbagai tantangan pelaksanaan penugasan percepatan swasembada gula yang diberikan kepada PT Perkebunan Nusantara III/ PT Sinergi Gula Nusantara, serta melakukan mitigasi terhadap potensi terjadinya El Nino di Tahun 2026. Salah satu mitigasi yang dilakukan adalah pengaturan pola tanam, efisiensi penggunaan air, menjaga kelembapan tanah, dan melakukan pemupukan tanaman secara berimbang

.Efisiensi Pelaksanaan Sumber Daya

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Pemanfaatan data kinerja dan rencana bisnis yang telah tersedia, baik dari internal PTPN Group dan ID FOOD maupun dari Kementerian BUMN, memungkinkan proses analisis berjalan lebih cepat dan terarah, tanpa memerlukan riset primer tambahan berkat basis informasi yang telah tervalidasi. Sinergi dengan tim teknis Kementerian BUMN turut memperkuat akurasi rekomendasi kebijakan yang disusun, sekaligus mengurangi kebutuhan koordinasi lintas sektor yang kompleks. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pelaksanaan kegiatan yang mengoptimalkan ruang rapat kantor dan metode daring maupun hybrid melalui video conference. Proyeksi efisiensi diperkirakan mencapai Rp40.000.000,- hingga Rp30.000.000,- untuk setiap kegiatan yang sebelumnya dilaksanakan melalui paket meeting. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan koordinasi lain yang sifatnya lebih strategis dan insidental pada periode berikutnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut, antara lain:

1. Triwulan II masih awal musim giling, sehingga produksi gula yang dihasilkan masih relatif rendah.

2. Penggunaan benih tebu yang tahan terhadap kondisi kering, pengaturan pola tanam, dan efisiensi penggunaan air sebagai upaya mitigasi dalam menghadapi potensi terjadinya El Nino.
3. Luas lahan tebu rakyat yang melakukan kemitraan dengan PTPN hanya sekitar 25% yang telah memasuki musim panen.
4. Lahan tebu yang berada di areal Perhutani atau di luar areal HGU dan Tebu Rakyat, belum masuk musim panen atau giling.

Sebagai upaya perbaikan, unit kerja mendorong pembentukan satgas lintas K/L dan BUMN untuk memperkuat koordinasi teknis, Pengembangan sistem data terintegrasi antar-BUMN agro, untuk mendukung analisis berbasis evidence dan pengambilan keputusan strategis yang lebih akurat serta responsif terhadap dinamika lapangan. Penyelenggaraan forum koordinasi triwulanan antara unit kerja, Kementerian BUMN, BUMN terkait, dan K/L pendukung, guna memastikan rekomendasi kebijakan tetap relevan dan adaptif. Penyiapan infrastruktur dan sarana prasarana dalam kegiatan pemanenan tebu, pengangkutan, pengolahan, dan pengemasan gula yang dihasilkan dari tebu PTPN III. serta menyusun template rekomendasi kebijakan yang mengakomodasi fleksibilitas model bisnis masing-masing entitas.

2 Sasaran Program 2: Terwujudnya Tingkat Inflasi pada Kisaran Sasaran

Pencapaian Sasaran Program 2: Terwujudnya Tingkat Implementasi pada Kisaran Sasaran ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja Tingkat Inflasi.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1. *Tingkat Inflasi* Latar Belakang

Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Dengan kondisi tersebut, tingkat inflasi perlu dikendalikan mengingat inflasi yang tinggi dan tidak stabil dapat memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat.

IKU Tingkat inflasi menggambarkan bagaimana upaya pemerintah dalam mengendalikan inflasi pada target yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, target inflasi ditetapkan oleh Pemerintah setiap tahun dalam UU tentang APBN dan UU tentang Rencana Kerja Pemerintah. IKU Tingkat Inflasi ini merupakan pengejawantahan dari tugas Kedeputan 1 pada Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) sebagai Kepala Sekretariat berdasarkan Keputusan Menko Perekonomian No. 313 tahun 2023 yang merupakan salah satu peraturan pelaksana Keputusan Presiden Nomor 23 tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional (TPIN).

IKU Tingkat Inflasi dihitung dengan menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK) yaitu indikator yang mengukur rata-rata perubahan harga dari sekumpulan barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Perhitungan tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Inflasi} = \frac{\text{IHK}_t - \text{IHK}_{t-1}}{\text{IHK}_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

IHK_t : IHK periode ini

IHK_{t-1} : IHK periode sebelumnya

Hasil Pengukuran Kinerja

Adapun target IKU Tingkat Inflasi pada tahun 2026 ditetapkan sebesar 2,5% ± 1%. Target tersebut ditetapkan berdasarkan amanat dalam UU Nomor 62 Tahun 2024 tentang APBN Tahun Anggaran 2026 dan Perpres Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 serta PMK No. 31 Tahun 2024 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2026, Tahun 2026, dan Tahun 2027.

Adapun target tiap triwulan sama dengan target tahunan (2,5% ± 1%) untuk tetap menjaga tingkat inflasi sepanjang tahun.

Hingga Triwulan II Tahun 2026, tingkat inflasi sebesar 3,34% atau mencapai 100% dari target Triwulan II tahun 2026 sebesar 2,5% ± 1% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
2.1 Tingkat Inflasi	Persen	2,5% ± 1%	3,34%	100 %

Inflasi pada bulan Juni sebesar 3,34% (mtm) masih terkendali dalam rentang sasaran. Inflasi Juni 2026 utamanya masih dipengaruhi oleh penyesuaian harga BBM nonsubsidi, gangguan pasokan beberapa komoditas pangan, serta dinamika permintaan domestik. Inflasi pada tahun 2026 diperkirakan akan terkendali pada rentang sasaran dan berada pada titik tengah 2,60% (yoy) dengan batas atas 2,80% (yoy). Inflasi tahun 2026 diperkirakan akan dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian global, kebijakan moneter bank sentral negara maju, fluktuasi harga komoditas global baik energi maupun pangan, serta kondisi cuaca yang dapat mempengaruhi hasil produksi komoditas pangan.

Mempertimbangkan realisasi tingkat inflasi sampai dengan Triwulan II serta koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah, TPIP, TIPID, serta stakeholder terkait, maka target tingkat inflasi hingga akhir tahun 2026 diproyeksikan akan berada pada rentang sasaran.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

2.1. Tingkat Inflasi			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1.	Penyusunan Laporan Menko kepada Presiden terkait realisasi inflasi dan intervensi Pemerintah TW I 2026	Terlaksana	Telah disusun dan disampaikan kepada Presiden melalui surat nomor : B/EKM.02.05/107A/M.EKON/04/2026
2.	Pelaksanaan HLM TPID	Tertunda dan digeser	Akan dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2026

3.	Pelaksanaan Rakor TPIP-TPID per wilayah	Terlaksana	Telah dilaksanakan Rakor TPID Wilayah Jawa pada tanggal 13 Mei 2026
----	---	------------	---

Upaya Nyata Pencapaian Kinerja

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan capacity building dalam rangka pembinaan TPID maupun terkait evaluasi kinerja TPID.
2. Rangkaian proses pelaksanaan evaluasi kinerja TPID tahun 2025 telah dimulai sejak Januari 2026. Hingga Mei 2026 telah dilaksanakan verifikasi dokumen penilaian yang telah disampaikan oleh TPID melalui Surat Keputusan Kemenko Perekonomian yang ditetapkan pada tanggal 25 Juni 2026 berdasarkan Berita Acara Nomor : BA-01/SET.TPIP/06/2026

Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi anggaran pada Triwulan II berdampak pada menurunnya intensitas koordinasi, yang pada gilirannya membatasi optimalisasi peran Kemenko Perekonomian dalam mengawal terjaganya inflasi dalam kisaran sasaran. Inflasi yang cukup rendah pada triwulan II akan meningkat pada triwulan berikutnya karena stimulus daya beli sehingga masyarakat dapat kembali berbelanja. Langkah perbaikan untuk meningkatkan efektivitas koordinasi guna menjaga inflasi dalam kisaran sasaran antara lain dengan melaksanakan kegiatan yang mengoptimalkan ruang rapat kantor dan metode daring maupun hybrid melalui video conference. Proyeksi efisiensi diperkirakan mencapai Rp5.000.000,- hingga Rp20.000.000,- untuk setiap kegiatan yang sebelumnya dilaksanakan melalui paket meeting. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan koordinasi lain yang sifatnya lebih strategis dan insidentil pada periode berikutnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sepanjang Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut, antara lain:

1. Kelompok Volatile Food (VF) masih menjadi sumber utama tekanan inflasi. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi sebesar 4,67% (yoy) dan memberikan andil terbesar terhadap inflasi nasional sebesar 1,36%. Tekanan inflasi didorong oleh kenaikan harga ikan segar, beras, minyak goreng, cabai merah, daging ayam ras, cabai rawit, bawang merah, daging sapi, dan jeruk.
2. Kelompok Administered Prices (AP) juga memberikan tekanan terhadap inflasi, terutama dari kelompok transportasi yang mengalami inflasi 4,57% (yoy) dengan andil 0,55% terhadap inflasi nasional. Inflasi pada kelompok ini didorong oleh kenaikan harga bensin dan tarif angkutan udara, sedangkan secara bulanan kelompok transportasi mencatat inflasi 2,29% (mtm) yang menjadi penyumbang terbesar inflasi Juni 2026.

Tekanan inflasi masih lebih banyak berasal dari faktor sisi penawaran (supply side) dibandingkan dari sisi permintaan. Hal ini mengindikasikan perlunya penguatan sinergi pengendalian inflasi melalui upaya menjaga pasokan, memperlancar distribusi, dan memperkuat koordinasi pusat dan daerah dalam stabilisasi harga pangan strategis.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan II tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan berikutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai, antara lain:

1. Melaksanakan Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah dengan substansi tematik per kawasan
2. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengendalian inflasi kepada anggota TPIP maupun K/L terkait

3 Sasaran Program 3: Terwujudnya Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah

Pencapaian Sasaran Program 3: Terwujudnya Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja Persentase Jumlah Pemerintah Daerah yang Masuk Kategori Digital.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1. Persentase Jumlah Pemerintah Daerah yang Masuk Kategori Digital

Latar Belakang

Persentase Jumlah Pemerintah Daerah yang Masuk Kategori Digital digambarkan melalui Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah (Indeks ETPD). Indeks ETPD merupakan profil ETPD dari seluruh pemerintah daerah yang diukur melalui komposit atas sub indeks implementasi (dengan bobot 70%), sub indeks realisasi (dengan bobot 10%), dan sub indeks lingkungan strategis (dengan bobot 20%). Dalam hal pengukuran, Indeks ETPD didapatkan dari data yang bersumber dari survei secara semesteran kepada seluruh pemerintah daerah menggunakan platform yang dikelola oleh Satgas P2DD, yakni Sistem Informasi P2DD. Pengkategorian pemerintah daerah berdasarkan Indeks ETPD meliputi:

- Digital (skor indeks 80-100)
- Maju (skor indeks 50-80)
- Berkembang (skor indeks 20-50)
- Inisiasi (skor indeks 0-20)

Adapun peran Kemenko Perekonomian dalam forum Satgas P2DD untuk mendukung pencapaian target IKU mencakup (dan tidak terbatas pada):

1. Penguatan ekosistem (diantaranya melalui dukungan koordinasi penyediaan sarana/prasarana, koordinasi penyusunan regulasi terkait, koordinasi pengusulan insentif daerah khusus untuk P2DD, koordinasi penguatan Bank RKUD, dll.)
2. Penguatan koordinasi (diantaranya melalui pelaksanaan Rakornas, Rakorpusda, Rakorwil, koordinasi tindak lanjut arahan Ketua Pengarah & Pelaksana Satgas P2DD dan koordinasi teknis lainnya)
3. Dukungan pelaksanaan survei
4. Sosialisasi dan Capacity Building Tim P2DD di daerah
5. Monitoring dan evaluasi

Hasil Pengukuran Kinerja

Target IKU Persentase Jumlah Pemerintah Daerah yang Masuk Kategori Digital pada tahun 2026 ditetapkan sebesar 92,5% berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Sekretariat Satgas P2DD tanggal 17 Januari 2026.

Adapun target pelaporan dilakukan tiap semester yang diambil datanya dari hasil Survei Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah. Survei Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah akan dilaksanakan pada Agustus

2026, sehingga realisasi Triwulan II Tahun 2026 diasumsikan masih sama dengan hasil survei tahun 2025 yaitu 93,6% atau mencapai 102% terhadap target Semester I sebesar 91,5%, dengan rincian sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
3.1 Persentase Jumlah Pemerintah Daerah yang Masuk Kategori Digital	Persen	91,5%	93,6%	102%

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

3.1. Persentase Jumlah Pemerintah Daerah yang Masuk Kategori Digital			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1.	Koordinasi Pelaksanaan Rakorwil P2DD 2026	Terlaksana	Telah dilaksanakan melalui pembahasan awal terkait estimasi penyelenggaraan Rakornas Pengendalian Inflasi & P2DD
2.	Pembahasan Peraturan Penguatan Kelembagaan Satgas P2DD 2026	Terlaksana	Telah dilaksanakan pada Rapat dengan Bank Indonesia Pembahasan Pelaksanaan Katalis II P2DD 2026, 10 April 2026

Upaya Nyata Pencapaian Kinerja

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

- Penyelenggaraan *Capacity Building* dan *High Level Meeting* (HLM) TP2DD di** (seperti Banten pada 1 April 2026, Jawa Barat pada 6–8 April 2026, hingga Jatim pada 20–22 April 2026), serta penyelenggaraan HLM TP2DD di Sidoarjo (6 April 2026) dan Makassar (9 April 2026) untuk memperkuat komitmen pimpinan daerah.
- Penguatan Koordinasi Kebijakan dan Kerjasama Antarlembaga**
Pelaksanaan rapat strategis bersama mitra lintas sektoral, mencakup pembahasan *Policy Matrix* Digitalisasi Daerah dengan ADB (9 April 2026), Kebijakan Dana Insentif Fiskal TA 2026 dengan Kemenkeu (20 April 2026), serta fasilitasi data *Championships TP2DD* bersama BPD, BI, Telkom, dan Jasa Raharja (April–Mei 2026).
- Akselerasi ETPD dan Sosialisasi Pembayaran Digital (KKI)**
Penyelenggaraan sosialisasi Program Katalis II P2DD X DIGDAYA (6 Mei 2026), *Kick Off* Implementasi KKI Fitur *Online Payment* E-Katalog (8 Mei 2026), serta diskusi strategi percepatan ETPD dan kesiapan BPD (Mei–Juni 2026).

4. Penilaian Kinerja, Evaluasi, dan Verifikasi Lapangan

Pelaksanaan persiapan penelaahan dokumen evaluasi kinerja TP2DD (6–8 Mei 2026), partisipasi dalam SESPI BI (26 Mei 2026), serta rapat bilateral dengan Bank Indonesia terkait hasil sementara penilaian P2DD dan verifikasi lapangan (2 Juni 2026).

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut, antara lain:

1. Kesulitan menyatukan waktu dan komitmen berbagai pihak (K/L, Pemda) dalam rapat koordinasi, audiensi, maupun diskusi teknis.
2. Adanya perubahan struktur organisasi, nomenklatur, dan pejabat di K/L yang terkait.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan II tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai antara lain melalui peningkatan koordinasi lintas pihak secara lebih terstruktur, percepatan penyesuaian dokumen perencanaan dan anggaran, penyesuaian konsep/format kegiatan yang akan datang serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.

4 Sasaran Program 4: Terjaganya Kualitas Pengelolaan Kebijakan Stimulus Ekonomi yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi

Pencapaian Sasaran Program 4: Terjaganya kualitas pengelolaan Kebijakan Stimulus Ekonomi yang mendukung pertumbuhan ekonomi ditunjukkan oleh pencapaian 1 (satu) indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Efektivitas Penyelesaian Kebijakan Stimulus Ekonomi

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

4.1 Persentase Efektivitas Penyelesaian Kebijakan Stimulus Ekonomi

Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kemenko Perekonomian mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang perekonomian, termasuk kebijakan fiskal, sektor riil, dan penguatan BUMN sebagai agen pembangunan. Dalam konteks ini, BUMN berperan strategis sebagai *policy vehicle* dalam implementasi berbagai stimulus ekonomi, baik melalui insentif fiskal, dukungan ketenagakerjaan, maupun penyediaan layanan publik strategis.

Selanjutnya, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenko Perekonomian menegaskan bahwa Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengelolaan dan pengembangan usaha Badan Usaha Milik Negara, termasuk peningkatan akselerasi pertumbuhan ekonomi, ketahanan sektor eksternal, dan stabilisasi harga.

Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN mengoordinasikan program peningkatan akselerasi pertumbuhan ekonomi atau

stimulus ekonomi untuk menjaga dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, terutama dengan meningkatkan daya beli masyarakat dan konsumsi domestik, mendukung sektor-sektor krusial seperti pariwisata dan transportasi, serta menciptakan lapangan kerja, melalui berbagai program seperti diskon transportasi, subsidi upah, bantuan pangan, hingga insentif pajak untuk sektor tertentu demi mencapai target pertumbuhan ekonomi sekitar 6,3% pada tahun 2026.

Persentase Efektivitas Program Stimulus Ekonomi adalah ukuran tingkat keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan program stimulus ekonomi yang berdampak pada kinerja BUMN, sektor usaha, ketenagakerjaan, dan konsumsi masyarakat, yang diukur berdasarkan kesesuaian realisasi output dan/atau outcome program terhadap target yang telah ditetapkan.

Adapun beberapa stimulus ekonomi tahun 2026 yang dikoordinasikan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN antara lain:

No	Program Stimulus Ekonomi	Kegiatan	Output	Target Sasaran
1	Bantuan Pemerintah Program Magang Lulusan Perguruan Tinggi sebanyak 100.000 Orang, Uang Saku sebesar UMP, masa 6 bulan (3 bulan di 2025, 3 bulan di 2026)	Monitoring Evaluasi	Laporan Monev	Triwulan I 2026
2	Implementasi PPh Pasal 21 DTP Penghasilan Peserta Pemagangan 2025-2026	Penyusunan Regulasi	Regulasi	Triwulan I 2026
3	Penyesuaian Jangka Waktu Pemanfaatan dan Penerima Manfaat PPh Final 0,5% bagi Wajib Pajak UMKM tertentu s.d. Tahun 2029	Penyusunan Regulasi	Regulasi	Triwulan II 2026
4	Perpanjangan PPh Pasal 21 DTP untuk Pekerja di Sektor Pariwisata dan Industri Padat Karya (APBN 2026)	Penyusunan Regulasi	Regulasi	Triwulan II 2026
5	Perpanjangan PPN DTP Sektor Perumahan, untuk Rumah dengan harga s.d Rp5 Miliar untuk bagian harga Rp2 Miliar sebesar 100% (Jan-Des 2026) dan diperpanjang hingga 2027 (Konpers APBN Kita)	Penyusunan Regulasi	Regulasi	Triwulan I 2026
6	Perpanjangan dan Perluasan Program Diskon Iuran JKK dan JKM untuk semua penerima	Penyusunan Regulasi	Regulasi	Triwulan I 2026

	Bukan Penerima Upah (BPU) Tahun 2026			
7	Diskon Tiket Kereta (PT KAI) sebesar 30% x harga tiket (NATARU 22 Des -10 Jan 26)	Penyusunan Regulasi dan Monitoring Evaluasi	Regulasi dan Laporan Monev	Triwulan I dan IV 2026
8	Diskon Angkutan Laut (PT PELNI) sebesar 20% x tarif dasar tidak termasuk asuransi dan pas Pelabuhan (NATARU 22 Des -10 Jan 26)	Penyusunan Regulasi dan Monitoring Evaluasi	Regulasi dan laporan Monev	Triwulan I dan IV 2026
9	Diskon Angkutan Penyeberangan (PT ASDP) sebesar 100% Jasa Pelabuhan (NATARU 22 Des -10 Jan 26)	Penyusunan Regulasi dan Monitoring Evaluasi	Regulasi dan Laporan Monev	Triwulan I dan IV 2026
10	Diskon Tiket Pesawat (NATARU 22 Des -10 Jan 26)	Penyusunan Regulasi dan Monitoring Evaluasi	Regulasi dan Laporan Monev	Triwulan I dan IV 2026

Sampai dengan Januari 2026, Program Stimulus Ekonomi yang telah ditetapkan sebagai target sebanyak 10 program sebagaimana tabel di atas. Jumlah program stimulus dapat bertambah sesuai kondisi ekonomi terkini dan keputusan dalam rapat koordinasi tingkat menteri yang dipimpin oleh Menko Perekonomian.

Untuk menghitung Persentase Efektivitas Program Stimulus Ekonomi dihitung berdasarkan rumus:

Persentase Efektivitas = Program stimulus ekonomi yang memenuhi target sasaran/program stimulus ekonomi yang diluncurkan x 100%

Nilai Akhir persentase efektivitas digunakan untuk menentukan hasil akhir dari keberhasilan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian di Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN.

Hasil Pengukuran Kinerja

Hasil penghitungan hingga Triwulan II Tahun 2026, Persentase Efektivitas Program Stimulus Ekonomi yang mencapai target yang telah terealisasi sebesar 100% atau mencapai 125% dari target Tahun 2026 sebesar 80% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
4.1 Persentase Efektivitas Penyelesaian Kebijakan Stimulus Ekonomi	Persen	80	100	120

Adapun stimulus ekonomi yang dikoordinasikan pada Triwulan II dan status pelaksanaannya sebagai berikut:

No	Program Stimulus Ekonomi	Kegiatan	Output	Status
1	Penyesuaian Jangka Waktu Pemanfaatan dan Penerima Manfaat PPh Final 0,5% bagi Wajib Pajak UMKM tertentu s.d. Tahun 2029	Penyusunan Regulasi	Regulasi	Telah terbit Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 (<i>diundangkan 22 April 2026</i>) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan
2	Perpanjangan PPh Pasal 21 DTP untuk Pekerja di Sektor Pariwisata dan Industri Padat Karya (APBN 2026)	Penyusunan Regulasi	Regulasi	Telah terbit Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105 Tahun 2025 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Tertentu yang Ditanggung Pemerintah dalam Rangka Stimulus Ekonomi Tahun Anggaran 2026

Memperhatikan upaya setiap keasdepan dalam mencapai persentase efektifitas program stimulus ekonomi sampai dengan Triwulan I, maka persentase efektifitas program stimulus ekonomi hingga akhir tahun 2026 diproyeksikan dapat tercapai.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

4.1. Persentase Efektivitas Penyelesaian Kebijakan Stimulus Ekonomi			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1.	Assesment pertumbuhan ekonomi triwulan II 2026	Terlaksana	Rapat Koordinasi Satgas Percepatan Program Pemerintah

			Untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi – 22 April 2026
2.	Monitoring dan evaluasi program stimulus insentif perpajakan	Terlaksana	Rapat Koordinasi Satgas Percepatan Program Pemerintah Untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi – 22 April 2026
3.	Monitoring dan evaluasi program stimulus Triwulan I	Terlaksana	Rapat Internal Pokja Pertumbuhan Ekonomi 21 April 2026
4.	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Stabilisasi Ekonomi TW II	Terlaksana	Rapat Koordinasi Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II – 2026 – 12 Mei 2026

Pelaksanaan rangkaian rapat koordinasi, Focus Group Discussion (FGD), pada Triwulan II Tahun 2026 saling melengkapi dalam mendukung pencapaian IKU. menghasilkan penyelarasan langkah implementasi kebijakan dan tindak lanjut lintas Kementerian/Lembaga, FGD memperkaya substansi kebijakan melalui masukan dari para ekonom dan praktisi. Secara keseluruhan, rangkaian kegiatan tersebut menjadi landasan dalam penyempurnaan implementasi kebijakan stimulus ekonomi pada periode berikutnya.

Upaya nyata untuk mencapai kinerja:

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan koordinasi intensif dengan Kementerian/Lembaga pelaksana guna memastikan kesiapan implementasi kebijakan stimulus ekonomi sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kebijakan stimulus ekonomi serta menyusun rekomendasi tindak lanjut sebagai dasar penyempurnaan pelaksanaan kebijakan.

Efisiensi Sumber Daya:

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia melalui koordinasi lintas Kementerian/Lembaga, penggunaan forum koordinasi yang telah ada, serta pemanfaatan media rapat daring dan luring sesuai kebutuhan. Pendekatan tersebut memungkinkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi berjalan secara efektif dan efisien tanpa memerlukan tambahan sumber daya yang signifikan. Sinergi antar Kementerian/Lembaga juga menghindari duplikasi pembahasan dan meningkatkan efektivitas proses pengambilan keputusan.. Proyeksi efisiensi diperkirakan mencapai

Rp35.000.000,- hingga Rp20.000.000,- untuk setiap kegiatan yang sebelumnya dilaksanakan melalui paket meeting. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan koordinasi lain yang sifatnya lebih strategis dan insidentil pada periode berikutnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun beberapa kendala yang dihadapi oleh masing-masing unit Asisten Deputi sebagai berikut:

1. Perbedaan tingkat kesiapan Kementerian/Lembaga dalam penyampaian data dan informasi pelaksanaan kebijakan stimulus ekonomi.
2. Dinamika perkembangan kondisi ekonomi serta perubahan kebutuhan kebijakan yang memerlukan penyesuaian dan koordinasi lintas sektor secara cepat.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan II tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Meningkatkan intensitas koordinasi, memperkuat koordinasi sejak tahap perencanaan sehingga potensi permasalahan implementasi dapat diidentifikasi lebih awal, dan monitoring bersama Kementerian/Lembaga pelaksana guna memastikan implementasi kebijakan berjalan sesuai rencana.
2. Memperkuat mekanisme monitoring dan evaluasi melalui penyempurnaan sistem pelaporan, percepatan penyampaian data, serta peningkatan kualitas rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program.

5 Sasaran Program 5: Terwujudnya Kebijakan Pengembangan BUMN dan Stabilitas Ekonomi yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Program 5: Terwujudnya Kebijakan Pengembangan BUMN dan Stabilitas Ekonomi yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian 2 (dua) indikator kinerja yaitu:

2. Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN;
3. Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Inflasi, Stimulus Ekonomi, Digitalisasi Daerah, dan Inovasi Pembiayaan Daerah

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

5.1 Indeks

Efektivitas

Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN

Latar Belakang

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator. Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengelolaan dan pengembangan usaha BUMN.

Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian (SKP) merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan bidang perekonomian. Adapun

rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Deputi diantaranya rancangan peraturan perundang-undangan, rancangan kelembagaan, rancangan perencanaan program, rancangan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan). Kemudian isu strategis yang termasuk dalam Indeks Efektivitas SKP di lingkup Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN adalah:

1. Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Pengembangan BUMN di Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi.
2. Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait pengembangan BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
3. Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan.
4. Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait pengembangan BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik.
5. Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis.

Nilai Indeks Efektivitas SKP kebijakan perekonomian didapat dengan didasarkan pada nilai indeks efektivitas SKP kebijakan yang terdapat pada seluruh Asisten Deputi dan dihitung dengan formulasi berikut:

$$\text{Indeks Efektivitas SKP} = \sqrt[5]{SKP_{AD\ 1} \times SKP_{AD\ 2} \times SKP_{AD\ 3} \times SKP_{AD\ 4} \times SKP_{AD\ 5}}$$

Keterangan:

- AD 1 : Isu Efektivitas SKP Kebijakan terkait Pengembangan BUMN di Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi.
- AD 2 : Isu Efektivitas SKP Kebijakan terkait pengembangan BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
- AD 3 : Isu Efektivitas SKP Kebijakan terkait pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan.
- AD 4 : Isu Efektivitas SKP Kebijakan terkait pengembangan BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik.
- AD 5 : Isu Efektivitas SKP Kebijakan terkait pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis.

Nilai Akhir Indeks efektivitas SKP digunakan untuk menentukan hasil akhir dari keberhasilan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian di bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN.

Hasil indeks SKP lalu dikonversikan ke skala, dengan rincian sebagai berikut:

- Sangat Efektif (4) : rentang nilai 91 - 100
- Efektif (3) : rentang nilai 81 - 90
- Cukup Efektif (2) : rentang nilai 71 - 80
- Kurang efektif (1) : rentang nilai < 70

Hasil Pengukuran Kinerja

Target IKU Indeks Efektivitas SKP Kebijakan Reguler dan Penugasan Umum pada triwulan II tahun 2026 adalah pada skala efektif (3). Untuk menghitung nilai Indeks dibutuhkan capaian nilai Indeks SKP masing-masing Asdep pada triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

No	Unit Eselon II	Efektivitas SKP (%)
1	Asdep Pengembangan BUMN Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi	40
2	Asdep Pengembangan BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	40
3	Asdep Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan	40
4	Asdep Pengembangan BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik	40
5	Asdep Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis	40

Dengan menggunakan formula perhitungan yang telah ditetapkan diperoleh nilai Indeks Kepuasan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN sebesar 40% atau berada pada rentang kategori **Cukup Efektif (2 dari 4)**.

Berdasarkan penghitungan tersebut di atas maka Nilai Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN triwulan II tahun 2026 dapat disajikan dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
5.1 Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN	Indeks	3 dari 4	2	66,67

Sampai dengan triwulan II-2026, Deputi 1 berupaya memberikan layanan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian sesuai dengan tugas dan fungsi dari Deputi 1 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Memperhatikan hal tersebut, maka persentase pemenuhan target Indeks Kepuasan Layanan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan BUMN hingga akhir tahun 2026 diproyeksikan dapat tercapai.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada

Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

5.1 Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN			
No	Rencana Aksi	Status	Keterangan
Triwulan I			
1.	Identifikasi Permasalahan Kebijakan Utilisasi Belanja Modal tahun 2026	Terlaksana	Telah dilaksanakan melalui beberapa kegiatan sebagai berikut: 1. Pembahasan Pembangunan dan Penguatan Infrastruktur Storage Minyak PT Pertamina tanggal 12 Januari 2026 dalam upaya mendorong pembahasan lebih lanjut dengan Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional yang <i>in-charge</i> dengan proyek pembangunan 18 kilang dan tangki tersebut; 2. Rapat pembahasan rencana awal tahapan proyek mobil nasional bersama Direktur PT Pindad pada tanggal 5 Januari 2026; 3. Monitoring dan evaluasi on desk Jumlah Realisasi Belanja Modal BUMN Himbara pada Triwulan I Tahun 2026.
2.	Identifikasi Permasalahan Kebijakan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat	Terlaksana	Telah dilaksanakan melalui beberapa kegiatan sebagai berikut: 1. Rapat monitoring dan evaluasi penjaminan pelaksanaan KUR Triwulan IV Tahun 2025 pada tanggal 30 Januari 2026; 2. Rapat konsolidasi pelaksanaan kredit program tahun 2026 pada tanggal 21 Januari 2026
3.	Identifikasi Permasalahan Kebijakan Penyelesaian Penugasan BUMN	Terlaksana	Telah dilaksanakan melalui beberapa kegiatan sebagai berikut: 1. Rapat Monitoring dan Evaluasi Kesiapan Pasokan BBM dan LPG Menjelang HBKN Nyepi dan Idul Fitri 2026 pada tanggal 5 Maret 2026 di Bandung yang melibatkan kementerian/lembaga maupun badan usaha terkait; 2. Mendorong percepatan kilang, salah satunya pembangunan kilang <i>Refinery Development Master Plan (RDMP) Refinery Unit (RU) V</i> Balikpapan yang telah diresmikan oleh Presiden pada 12 Januari 2026; 3. Diskusi (FGD) terkait Dukungan <i>Sovereign Guarantee</i> Proyek <i>Grass Root Refinery (GRR)</i> Tuban pada tanggal 22 Januari 2026 di Surabaya yang melibatkan kementerian/lembaga

maupun badan usaha terkait. Sehingga diperoleh kesimpulan perlunya dukungan pemerintah dalam pelaksanaan proyek GRR Tuban melalui penjaminan pemerintah kepada BUMN untuk meningkatkan kelayakan dan daya tarik proyek bagi investor dan lembaga pembiayaan, serta inisiasi penyusunan Perpres Penugasan dari Kementerian ESDM atau BP BUMN;

4. FGD dukungan pembiayaan pembangunan GRR Tuban pada tanggal 11 Maret 2026, sehingga diperoleh hasil bahwa adanya kebutuhan dukungan pembiayaan khususnya dari luar negeri serta perlunya koordinasi bersama K/L dan beberapa pemerintah luar negeri dalam upaya kerjasama pembiayaan proyek;
5. Rapat rencana pembangunan jaringan gas bumi: dampak tambahan anggaran dari APBN pada tanggal 2 Juni 2026, sehingga diperoleh hasil bahwa alokasi ABT bersifat tahun jamak yang difokuskan pada penyelesaian output keseluruhan di akhir masa kontrak (tidak memiliki alokasi target capaian per tahun);
6. Koordinasi dengan PTPN III (Persero)/PT SGN pada tanggal 27 Maret 2026 terkait upaya percepatan swasembada gula;
7. Koordinasi rencana pelaksanaan stimulus dikson transportasi periode HBKN Ramadhan dan Idulfitri tahun 2026 oleh PT KAI, PT Pelni, dan PT ASDP;
8. Koordinasi persiapan reimbursement diskon transportasi periode libur Nataru 2025/2026 oleh PT KAI, PT Pelni, dan PT ASDP;
9. Koordinasi pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) di daerah pascabencana oleh BUMN Karya;
10. Koordinasi penyelesaian pembayaran biaya salur penyaluran BLTS Kesra oleh PT Pos Indonesia.

Triwulan II

4	Penyusunan alternatif rekomendasi kebijakan	Terlaksana	Telah dilaksanakan melalui beberapa kegiatan sebagai berikut: 1. Mendorong perbaikan dan penggantian mesin baru di beberapa
---	---	------------	--

	utilitas belanja modal BUMN 2026		Pabrik Gula (PG) diantaranya di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera II, melalui rapat koordinasi sebagai upaya percepatan utilitas belanja modal BUMN 2026 pada modernisasi pabrik gula di bawah SugarCo; 2. Mendorong penyelesaian isu strategis yang menghambat perluasan jaringan fiber optic dan penggelaran kabel laut pasela PT Telkom, melalui monitoring dan evaluasi lapangan serta audiensi level teknis, guna percepatan utilitas belanja modal BUMN bidang telekomunikasi tahun 2026; 3. Monitoring realisasi belanja modal BUMN bidangf ESDM (PT Mind-ID, PT Pertamina, dan PT PLN) triwulan I guna memastikan utilitas belanja modal BUMN dalam mendukung percepatan program strategis pada triwulan II.
5	Penyusunan alternatif rekomendasi kebijakan penyaluran Kredit Usaha Rakyat	Terlaksana	Telah dilaksanakan melalui beberapa kegiatan sebagai berikut: 1. Telah terlaksananya FGD terkait Permenko KUR nomor 1 dan 2 tahun 2026 pada tanggal 8 Mei 2026; 2. Terlaksananya Rapat Internal Deputy 1 Pembahasan Rakor Growth dan KUR pada tanggal 11 Mei 2026; 3. Terlaksananya Rapat Teknis Pembahasan Rakomjak dan Review Usulan PNM pada tanggal 29 Mei 2026; 4. Telah terlaksananya Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM Tingkat Eselon I pada tanggal 12 Mei 2026; 5. Telah terlaksana Agenda Deputy: Pertemuan dengan Deputy Akuntan Negara BPKP Membahas Laporan KUR dari BPKP pada tanggal 14 April 2026;
6	Penyusunan alternatif rekomendasi kebijakan penyelesaian penugasan BUMN	Terlaksana	Telah dilaksanakan melalui beberapa kegiatan sebagai berikut: 1. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan diskon tiket pesawat pasca idul fitri, melalui rakor level eselon I dan rakor level teknis; 2. Telah dilaksanakan rapat koordinasi secara berkelanjutan dengan PT Pertamina (Persero) terkait penyediaan dan pendistribusian JBT dan JBKP; 3. Koordinasi dan Sinkronisasi penyelesaian pembangunan Kilang Existing/RDMP, melalui rapat koordinasi serta kegiatan monitoring

dan evaluasi pengembangan green refinery Cilacap phase 2 pada tanggal 25 Juni 2026 di Head Office Refinery Unit (RU) Cilacap;

4. Koordinasi dan sinkronisasi percepatan penyelesaian pembangunan Kilang Minyak Tuban (GRR Tuban), melalui rapat koordinasi tentang potensi kerjasama ekonomi antara Rusia dengan Indonesia khususnya dalam rangka mendorong potensi pembiayaan proyek GRR Tuban pada tanggal 26 Mei 2026;
5. Koordinasi dan sinkronisasi percepatan penyelesaian kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu, melalui Kunjungan Kerja dan Peninjauan Lapangan Pilot Project Jaringan Gas Bumi untuk sektor rumah tangga dan industri di Kota Batam pada 16 April 2026;
6. Koordinasi Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (PIK) yang terdiri dari pembangkit tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, gardu induk, dan sarana pendukung lainnya, melalui ormasi PLTD dan Program Accelerated Renewable Energy Development (ARED) yang diselenggarakan di Kemenko Perekonomian pada 1 April 2026;
7. Koordinasi dan sinkronisasi data progres kebijakan percepatan swasembada gula oleh BUMN Agro, melalui Rapat Koordinasi dengan Kementerian/Lembaga (K/L) pada tanggal 16 April 2026 terkait proyeksi produksi Gula Kristal Putih (GKP) atau Gula Konsumsi Nasional;
8. Monitoring kesiapan giling tebu dalam rangka percepatan swasembada gula sampai TW II 2026 dilakukan secara daring pada tanggal 3 Juli 2026;
9. Koordinasi persiapan reimbursement diskon transportasi periode libur Nataru 2025/2026 oleh PT KAI, PT Pelni, dan PT ASDP.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan triwulan II tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun beberapa kendala yang dihadapi oleh masing-masing unit Asisten Deputi sebagai berikut:

1. Asdep Pengembangan BUMN Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi
 - a. Terdapat ketidaksesuaian antara jadwal pelaporan kinerja BUMN dengan kebutuhan data dan informasi untuk penyusunan laporan kinerja ini,

sehingga data dan informasi dari BUMN belum sepenuhnya tersedia karena masih dalam tahap konsolidasi;

- b. Koordinasi antar K/L masih kompleks.
2. Asdep Pengembangan BUMN Bidang ESDM
 - a. Terdapat BUMN kurang responsif dan tidak langsung memberikan informasi yang dibutuhkan selama koordinasi awal untuk mengetahui target Capex BUMN bidang ESDM;
 - b. Tanggapan BUMN dan BP BUMN yang kurang responsif dalam menyampaikan data terbaru terkait realisasi Capex TW I Tahun 2026.
3. Asdep Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan
 - a. Keterbatasan alokasi anggaran koordinasi lapangan;
 - b. Minimnya ketersediaan data terkini realisasi Capex dari BUMN;
 - c. Beberapa BUMN belum menjadikan percepatan realisasi Capex sebagai prioritas utama mengingat kebijakan BPI Danantara.
4. Asdep Pengembangan BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik
 - a. Pendapat masyarakat di media sosial yang lebih membutuhkan diskon harga sembako daripada kebijakan diskon transportasi;
 - b. Belum adanya penjelasan rinci mengenai perhitungan bisnis dan dasar pemberian insentif kepada investor swasta terkait kebijakan diskon tarif tol Jakarta–Cikampek pada akhir libur sekolah, terutama karena 60% saham JLC dimiliki investor swasta. Meskipun investor tidak menolak kebijakan diskon tersebut, mereka mempertanyakan dasar pelaksanaannya karena dalam PPJT tidak terdapat ketentuan mengenai diskon tarif tol, termasuk periode pemberlakuannya. Akibatnya, investor meminta kepastian terkait jangka waktu pemberian diskon tarif tol kepada perusahaan;
 - c. Tidak adanya dasar hukum bagi BUMN untuk melakukan aksi korporasi berupa pemberian diskon tarif tol;
 - d. Masih kompleksnya koordinasi antar K/L terkait.
5. Asdep Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis
 - a. Terdapat ketidaksesuaian antara jadwal pelaporan realisasi Belanja Modal BUMN Himbara dengan kebutuhan penyusunan laporan kinerja ini, sehingga data dan informasi yang diperlukan belum sepenuhnya tersedia karena masih dalam proses konsolidasi oleh BUMN;
 - b. Proses koordinasi dan sinkronisasi data membutuhkan waktu yang lebih panjang mengingat keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam penyediaan dan verifikasi data;
 - c. Proses koordinasi dan sinkronisasi data membutuhkan waktu yang lebih panjang mengingat keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam penyediaan dan verifikasi data;
 - d. Beberapa Penyalur KUR cenderung menyalurkan KUR pada sektor nonproduksi;
 - e. Proses koordinasi dan sinkronisasi data membutuhkan waktu yang lebih panjang mengingat keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam penyediaan dan verifikasi data;
 - f. Beberapa Penyalur KUR cenderung menyalurkan KUR pada debitur eksisting;
 - g. Proses koordinasi dan sinkronisasi data membutuhkan waktu yang lebih panjang mengingat keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam penyediaan dan verifikasi data;

- h. Beberapa Penyalur KUR cenderung menyalurkan KUR pada debitur eksisting;
- i. Keterbatasan waktu dalam penyelenggaraan sosialisasi kebijakan KUR.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Memperbaharui data secara berkala guna mendukung pemantauan berkelanjutan atas pencapaian kinerja BUMN;
2. Meningkatkan sinergi antar K/L dan pemangku kepentingan lainnya dalam menindaklanjuti hasil pemantauan dan evaluasi;
3. Peningkatan intensitas koordinasi dan sinkronisasi secara langsung dengan BUMN, seiring dengan normalisasi alokasi anggaran;
4. Optimalisasi sistem pendataan realisasi capex secara triwulanan, termasuk validasi dan analisis tren pertumbuhan capex berdasarkan sektor dan kelompok BUMN;
5. Pemetaan masalah dan hambatan per BUMN juga akan diperkuat sebagai dasar penyusunan intervensi kebijakan percepatan realisasi capex yang lebih tepat sasaran;
6. Meningkatkan koordinasi capaian realisasi jumlah belanja modal BUMN Himbara serta pemantauan berkelanjutan atas pencapaian kinerja belanja modal BUMN terkait;
7. Meningkatkan sinergi antar K/L dan pemangku kepentingan lainnya dalam menindaklanjuti hasil pemantauan dan evaluasi kinerja belanja modal BUMN Himbara;
8. Meningkatkan komunikasi efektif dalam mendorong penyaluran KUR kepada Debitur KUR baru;
9. Meningkatkan komunikasi efektif dalam mendorong penyaluran KUR kepada Debitur KUR Graduasi/Naik Kelas;
10. Meningkatkan komunikasi efektif dalam mendorong optimalisasi penyaluran KUR tahun 2026 yang efektif dan tepat sasaran.

5.2 Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Inflasi, Stimulus Ekonomi, Digitalisasi Daerah, dan Inovasi Pembiayaan Daerah

Latar Belakang

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator. Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengelolaan dan pengembangan usaha badan usaha milik negara.

Indeks Efektivitas SKP merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan bidang perekonomian. Adapun rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Deputi diantaranya rancangan peraturan perundang-undangan, rancangan kelembagaan, rancangan perencanaan program, rancangan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan). Kemudian isu strategis yang termasuk dalam Indeks Efektivitas SKP di lingkup

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN adalah:

1. Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Inflasi
2. Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Stimulus Ekonomi.
3. Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Digitalisasi Daerah.
4. Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Inovasi Pembiayaan Daerah.

Nilai Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan perekonomian didapat dengan didasarkan pada nilai indeks efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan yang terdapat pada seluruh asisten deputi dan dihitung dengan formulasi berikut:

$$\text{Indeks Efektivitas SKP} = \sqrt[3]{SKP\ ISU\ 1 \times SKP\ ISU\ 2 \times SKP\ ISU\ 3 \times SKP\ ISU\ 4}$$

Keterangan:

- SKP ISU 1 : Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Inflasi.
- SKP ISU 2 : Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Stimulus Ekonomi.
- SKP ISU 3 : Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Digitalisasi Daerah.
- SKP ISU 4 : Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Inovasi Pembiayaan Daerah.

Adapun definisi SKP masing-masing isu tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Sinkronisasi, Koordinasi, Pengendalian Inflasi (SKP Inflasi)

Inflasi yang tercermin melalui Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Stabilitas Harga terutama pada komoditas pangan strategis melalui penguatan peran dan sinergi Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Daerah (TPID), yang diampu oleh Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan.

2. Sinkronisasi, Koordinasi, Pengendalian Stimulus Ekonomi (SKP Stimulus Ekonomi)

Stimulus Ekonomi merupakan upaya peningkatan akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui penguatan sektor riil yang berorientasi pada penciptaan nilai tambah dan padat karya yang tercermin melalui Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Sektor Eksternal termasuk penguatan neraca transaksi berjalan serta antisipasi dampak kebijakan eksternal seperti tarif ekspor-impor oleh negara mitra dagang antara lain kebijakan tarif AS dan dinamika politik di Timur Tengah, yang diampu oleh Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan

3. Sinkronisasi, Koordinasi, Pengendalian Digitalisasi Daerah (SKP Digitalisasi Daerah)

Digitalisasi Daerah merupakan proses transformasi suatu daerah melalui pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, yang tercermin melalui Persentase efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan terkait partisipasi Pemerintah Daerah dalam survei Indeks ETPD diampu oleh Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi.

4. Sinkronisasi, Koordinasi, Pengendalian Inovasi Pembiayaan Daerah (SKP Inovasi Pembiayaan Daerah)

Inovasi pembiayaan daerah menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan ditengah keterbatasan kapasitas fiskal daerah. Ketergantungan yang masih tinggi terhadap transfer ke daerah dan terbatasnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) menuntut pemerintah daerah untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mencari sumber pembiayaan pembangunan. Inovasi pembiayaan tidak hanya berfungsi sebagai alternatif pendanaan, tetapi juga sebagai katalis percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas layanan publik. Upaya peningkatan inovasi pembiayaan daerah diampu oleh Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik.

Nilai Akhir Indeks efektivitas SKP digunakan untuk menentukan hasil akhir dari keberhasilan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian di Bidang Inflasi, Stimulus Ekonomi, Digitalisasi Daerah, dan Inovasi Pembiayaan Daerah.

Hasil indeks SKP lalu dikonversikan ke skala, dengan rincian sebagai berikut:

Sangat Efektif (4)	: rentang nilai 91 - 100
Efektif (3)	: rentang nilai 81 - 90
Cukup Efektif (2)	: rentang nilai 71 - 80
Kurang efektif (1)	: rentang nilai < 70

Hasil Pengukuran Kinerja

Target IKU Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Inflasi, Stimulus Ekonomi, Digitalisasi Daerah, dan Inovasi Pembiayaan Daerah Triwulan II adalah pada skala 3 (efektif). Untuk menghitung nilai Indeks dibutuhkan capaian nilai Indeks SKP Isu Strategis pada triwulan II sebagai berikut:

No	Isu Strategis	Indeks Efektivitas SKP
1	Inflasi	40
2	Stimulus Ekonomi	40
3	Digitalisasi Daerah	40
4	Inovasi Pembiayaan Daerah	40

Penghitungan Nilai Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian dihitung dengan formula berikut:

$$\text{Indeks Efektivitas SKP} = \sqrt[4]{SKP\ ISU\ 1 \times SKP\ ISU\ 2 \times SKP\ ISU\ 3 \times SKP\ ISU\ 4}$$

Hasil penghitungan diperoleh nilai akhir Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Reguler dan Penugasan Umum pada Triwulan I sebesar 40% dan apabila dikonversikan berada pada skala **cukup efektif (2 dari 4)**.

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
5.2 Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Inflasi, Stimulus Ekonomi, Digitalisasi Daerah, dan Inovasi Pembiayaan Daerah	Indeks	3 dari 4	2 dari 4	66,67

Memperhatikan upaya setiap keasdepan dalam mencapai efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Inflasi, Stimulus Ekonomi, Digitalisasi Daerah, dan Inovasi Pembiayaan Daerah sampai dengan Triwulan II, maka Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Inflasi, Stimulus Ekonomi, Digitalisasi Daerah dan Inovasi Pembiayaan Daerah hingga akhir tahun 2026 diproyeksikan dapat tercapai.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

5.2 Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Inflasi, Stimulus Ekonomi, Digitalisasi Daerah, dan Inovasi Pembiayaan Daerah				
No	Rencana Aksi		Status	Keterangan
Triwulan I				
1.	Koordinasi Penyusunan Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2025 - 2027		Terlaksana	Telah dilaksanakan HLM TPIP Tingkat Menteri di Kantor Kemenko Perekonomian tanggal 31 Januari 2026
2.	Pelaksanaan Kinerja TPID	Evaluasi	Terlaksana	Pelaksanaan proses evaluasi kinerja TPID tahun 2025 (TPID Award 2026) ronde I tanggal 10-14 Maret 2026
3.	Rapat Koordinasi Stimulus Ekonomi TW I Tingkat Eselon I		Terlaksana	1. Rapat Eselon I Stimulus Diskon Transportasi tentang Evaluasi Implementasi Stimulus Diskon Transportasi Periode Nataru 2025/2026 dan Persiapan Implementasi Diskon Transportasi Periode Libur Idul Fitri 2026 pada tanggal 27 dan 28 Januari 2026:

				2. Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Terkait Stimulus Ekonomi Pada Tanggal 29 Januari 2026; 3. Rakorses Tindak Lanjut RTM dan Persiapan Pelaksanaan Stimulus Diskon Transportasi dan Work From Anywhere (WFA) Periode Lebaran Idul Fitri 2026M/1447H pada tanggal 30 Januari 2026; 4. Rakorses Tindak Lanjut Persiapan Pelaksanaan Stimulus Ekonomi: Diskon Transportasi, Pembatasan Angkutan Barang Periode Lebaran dan Idul Fitri 1447H/2026M pada tanggal 6 Februari 2026; 5. Rakor Es1 – Akselerasi Belanja Program Prioritas APBN untuk Mendorong Pertumbuhan Triwulan I-2026 pada tanggal 9 Februari 2026; 6. Konferensi Pers Para Menteri terkait Capaian Ekonomi Tahun 2025, Stimulus Ekonomi Diskon Tarif Transportasi HBKN Idul Fitri, WFA dan Bantuan Pangan pada Tanggal 10 Februari 2026.
4.	Monitoring pelaksanaan Stimulus Ekonomi TW I	Terlaksana		Kunjungan dalam rangka Diskusi Rencana Aksi Pemulihan Ekonomi pascabencana tanggal 6-7 Februari 2026.
5.	Identifikasi permasalahan kebijakan percepatan dan perluasan Digitalisasi Pemerintah	Terlaksana		Telah dilaksanakan melalui penyelenggaraan beberapa kegiatan Diskusi Pengembangan Indeks ETPD Ke Depan dengan ADB dan BI selama Februari 2026
Triwulan II				
6.	Penetapan hasil evaluasi kinerja TPID dalam Keputusan Menko Perekonomian	Terlaksana		Terlaksana dan telah ditetapkan dalam berita Acara melalui Rapat Pleno Eselon 1 Penetapan Pemenang TPID Award tahun 2025 (award 2026): BA-01/SET.TPIP/06/2026 dan

				melalui Kepmenko No 505 tahun 2026
7.	Koordinasi pelaksanaan Rakortas Inflasi	Pengendalian	Terlaksana	Telah disampaikan surat kepada Presiden nomor : No. EK.02.05/138/M.EKO N/05/2026 dan No.28/06/GBIDKEM/Srt/B
8.	Pelaksanaan dan evaluasi program kerja TPIP 2026	monitoring pelaksanaan	Terlaksana	Telah dilakukan pelaksanaan program kerja TPIP 2026 melalui strategi 4K pada tanggal 23-25 April 2026
9.	Rapat Koordinasi Stimulus Ekonomi TW II Tingkat Eselon I		Terlaksana	1. Rapat Internal Pembahasan Pokja Pertumbuhan Ekonomi 21 April 2026; 2. Rapat Koordinasi Satgas Percepatan Program Pemerintah Untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi – 22 April 2026; 3. Rapat Internal Pembahasan Kurs dan Insentif Bea Masuk Pelastik – 26 April 2026; 4. Rapat Koordinasi Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II – 2026 – 12 Mei 2026; 5. Rapat Koordinasi Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II – 2026 (Program Prioritas) – 18 Mei 2026; 6. Rapat Koordinasi Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II – 2026 (KDMP dan Bansos) – 22 Mei 2026; 7. Rapat Koordinasi Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II – 2026 melalui Percepatan Realisasi Belanja K/L – 4 Juni 2026; 8. Rapat Koordinasi Update Kesiapan Pelaksanaan Paket Stimulus Triwulan II/Semester 2 – 5 Juni 2026; 9. Rapat Pembahasan Indonesia Country Growth and Jobs Report Policy Matrix – 25 Juni 2026.
10.	Evaluasi pelaksanaan Stimulus Ekonomi TW I		Terlaksana	1. Monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan pelaksanaan program stimulus ekonomi,

				termasuk identifikasi berbagai isu strategis dan potensi risiko yang dapat memengaruhi efektivitas kebijakan triwulan I;
				2. Monev dan Diskusi terkait Infrastruktur Jaringan Telekomunikasi, serta Peninjauan Lapangan terkait ETPD, Juni 2026.
11.	Monitoring pelaksanaan Stimulus Ekonomi TW II	Terlaksana	1.	Rapat Evaluasi Pelaksanaan WFH Tahun 2026 – 22 Mei 2026;
			2.	Monitoring dan Evaluasi (Monev) Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan dan Bantuan Pangan – Juni 2026.
12.	Penyusunan Alternatif Rekomendasi kebijakan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Pemerintah	Terlaksana		Penyusunan, penetapan, dan distribusi Surat perihal Survei Indeks ETPD Semester I Tahun 2026, pada Juni 2026

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan triwulan I tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun beberapa kendala yang dihadapi tiap isu strategis sebagai berikut:

1. Pengendalian Inflasi

- a. Tekanan inflasi terutama berasal dari komponen volatile food dan administered prices, yang masih dipengaruhi oleh dinamika pasokan pangan, biaya transportasi, serta penyesuaian harga pada beberapa komoditas strategis;
- b. Kelompok Volatile Food (VF) masih menjadi sumber utama tekanan inflasi. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi sebesar 4,67% (yoy) dan memberikan andil terbesar terhadap inflasi nasional sebesar 1,36%. Tekanan inflasi didorong oleh kenaikan harga ikan segar, beras, minyak goreng, cabai merah, daging ayam ras, cabai rawit, bawang merah, daging sapi, dan jeruk. Secara bulanan, inflasi juga dipengaruhi oleh kenaikan harga bawang merah, bawang putih, beras, wortel, ikan segar, minyak goreng, cabai merah, dan daging sapi. Kondisi tersebut mengindikasikan masih adanya tantangan dalam menjaga ketersediaan pasokan pangan, kelancaran distribusi, serta stabilisasi harga komoditas strategis, sehingga tekanan inflasi pangan masih relatif tinggi;
- c. Kelompok Administered Prices (AP) juga memberikan tekanan terhadap inflasi, terutama dari kelompok transportasi yang mengalami inflasi 4,57% (yoy) dengan andil 0,55% terhadap inflasi nasional. Inflasi pada kelompok ini didorong oleh kenaikan harga bensin dan tarif angkutan udara, sedangkan secara bulanan kelompok transportasi mencatat inflasi 2,29% (mtm) yang menjadi penyumbang terbesar inflasi Juni 2026. Kondisi ini menunjukkan masih adanya tekanan pada biaya transportasi dan mobilitas masyarakat, yang berdampak pada peningkatan harga barang dan jasa. Selain itu, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga juga mengalami inflasi yang dipengaruhi oleh kenaikan harga bahan bakar rumah tangga;

- d. Inflasi inti (core inflation) masih terjaga pada level 2,76% (yoy). Namun, inflasi harga bergejolak (volatile food) sebesar 5,58% (yoy) dan harga diatur pemerintah (administered prices) sebesar 3,42% (yoy) menunjukkan bahwa tekanan inflasi masih lebih banyak berasal dari faktor sisi penawaran (supply side) dibandingkan dari sisi permintaan. Hal ini mengindikasikan perlunya penguatan sinergi pengendalian inflasi melalui upaya menjaga pasokan, memperlancar distribusi, dan memperkuat koordinasi pusat dan daerah dalam stabilisasi harga pangan strategis.
2. Stimulus Ekonomi
 - a. Dinamika perkembangan kondisi ekonomi mengharuskan penyesuaian substansi kebijakan stimulus secara tepat;
 - b. Perbedaan waktu penyampaian data dan informasi dari K/L memerlukan proses konsolidasi yang lebih intensif;
 - c. Tingginya kebutuhan koordinasi lintas sektor.
 3. Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah
 - a. Partisipasi dan kualitas pengisian belum optimal, dimana sebagian kecil pemda & BPD tidak dapat mengikuti sosialisasi secara penuh karena keterbatasan waktu, kesibukan operasional, atau kendala teknis (jika dilakukan daring);
 - b. Tingkat pemahaman tidak merata, dengan pengisi survei dan pemilik/pengelola data memiliki latar belakang dan tingkat pemahaman yang berbeda terhadap materi ETPD, sehingga terjadi kesenjangan pemahaman selama survei berlangsung;
 4. Inovasi Pembiayaan Daerah
 - a. Skema-skema pembiayaan inovatif seringkali membutuhkan anggaran baru yang membuat hal ini perlu perencanaan yang cukup baik, ataupun perubahan. Hal ini menimbulkan kurangnya fleksibilitas Pemda untuk secara cepat menerapkan skema-skema inovatif tersebut;
 - b. Pemda masih membutuhkan pemahaman terkait hutang Daerah, baik dari sisi implikasi, pemanfaatan serta pengelolaannya;
 - c. Minat Pemda kepada skema KPBU relatif menurun dari periode-periode sebelumnya. Hal ini nampak dari jumlah Proyek yang menurun secara signifikan.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Melaksanakan program/kegiatan sesuai rencana aksi pada triwulan III diantaranya yaitu rapat koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi dan pelaksanaan rakor pusat dan daerah dengan substansi tematik per kawasan;
2. Meningkatkan intensitas koordinasi dan monitoring bersama Kementerian/Lembaga pelaksana untuk memastikan implementasi kebijakan stimulus berjalan sesuai target;
3. Memperkuat mekanisme pelaporan dan pertukaran data pelaksanaan program stimulus ekonomi guna meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi;
4. Meningkatkan kualitas analisis dan rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil evaluasi implementasi program stimulus ekonomi;
5. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan koordinasi, dokumentasi, dan pemantauan tindak lanjut hasil rapat;

6. Partisipasi dan kualitas pengisian belum optimal, dimana sebagian kecil pemda & BPD tidak dapat mengikuti sosialisasi secara penuh karena keterbatasan waktu, kesibukan operasional, atau kendala teknis (jika dilakukan daring);
7. Tingkat pemahaman tidak merata, dengan pengisi survei dan pemilik/pengelola data memiliki latar belakang dan tingkat pemahaman yang berbeda terhadap materi ETPD, sehingga terjadi kesenjangan pemahaman selama survei berlangsung;
8. Melakukan sosialisasi kepada Pemda-Pemda yang tertarik untuk melakukan pembiayaan inovatif, untuk dapat menyiapkan tidak hanya persyaratan-persyaratan teknis, namun juga anggaran untuk hal-hal yang dibutuhkan;
9. Mendorong penyempurnaan adaptasi skema KPBU untuk lebih dapat memudahkan penggunaan skema KPBU oleh Pemda-Pemda secara lebih luas, khususnya terkait dengan penurunan nilai modal penyiapan dari Proyek KPBU.

6 Sasaran Program 6: Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Program 5: Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang Berkualitas ditunjukkan oleh indikator kinerja:

Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

6.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN

Latar Belakang

Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di bidang koordinasi pengelolaan dan pengembangan usaha BUMN merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan pelayanan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Survei yang dilakukan adalah survei skala likert dengan skala 1 sampai 4. Survei akan dilakukan dengan menggunakan *Google Form*.

Tujuan dari IKU ini adalah untuk mengukur tingkat efektivitas dari proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan terkait dengan koordinasi pengelolaan dan pengembangan usaha BUMN sehingga mendorong terciptanya kebijakan yang berkualitas.

Mengukur indikator tingkat Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN dilakukan dengan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/*stakeholder* terkait. Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh koresponden, dengan empat kategori penilaian, yaitu (1) Sangat Tidak Puas, (2) Tidak Puas, (3) Puas, dan (4) Sangat Puas, rumus perhitungan sebagai berikut

**Indeks Kepuasan
Layanan Sinkronisasi,
Koordinasi, dan
Pengendalian**

$$= \frac{\text{Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep} + \text{Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep} + \text{Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep} + \text{Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep} + \text{Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep}}{5}$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 3 dari 4, penetapan target berdasarkan Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Tahun 2026.

Survei Kepuasan Layanan Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Semester I-2026 telah dilaksanakan pada tanggal 1-10 Juli 2026 dengan total 117 responden dari mitra koordinasi Deputy I antara lain Kementerian/Lembaga (Bappenas, Kemenkeu, Kemendagri, dll), BUMN (Pertamina, PLN, Telkom, MIND ID, dll), Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, hingga lembaga internasional seperti ADB dan UNDP. Berdasarkan hasil survei tersebut, capaian Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang berkualitas berada pada kategori sangat puas (4), dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW I	Realisasi	% Kinerja
6.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang Berkualitas	Indeks	3 dari 4	4	120

Rincian Indeks Kepuasan Layanan pada masing-masing Asisten Deputy yang menjadi dasar perhitungan sebagai berikut:

No	Asisten Deputy	Indeks Kepuasan
1	Asdep Pengembangan BUMN Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi	3,67
2	Asdep Pengembangan BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	3,85
3	Asdep Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan	3,74
4	Asdep Pengembangan BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik	3,70
5	Asdep Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis	3,77

Dengan menggunakan formula yang telah ditetapkan diperoleh nilai Indeks Kepuasan Layanan Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN sebesar 3,74 atau berada pada rentang kategori Sangat Puas (4).

Memperhatikan hal tersebut, maka persentase pemenuhan target Indeks Kepuasan Layanan Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan BUMN hingga akhir Tahun 2026 diproyeksikan dapat tercapai.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

6.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang Berkualitas			
No	Rencana Aksi	Status	Keterangan
Triwulan I			
1.	Persiapan Survei Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Semester I	Terlaksana	1. Telah dilaksanakan penyusunan konsep awal survei kepuasan layanan kepada stakeholders oleh masing-masing unit Eselon II 2. Telah dilaksanakan inventarisasi responden survei
2.	Koordinasi <i>debottlenecking</i> isu-isu strategis BUMN	Terlaksana	Telah dilaksanakan keterlibatan aktif dalam rapat, audiensi dan forum diskusi bersama stakeholder untuk memperkuat kerja sama antar pihak terkait, diantaranya: 1. Fasilitasi Diskusi Penanganan Blank-spot Kabupaten Lebak pada tanggal 4 Februari 2026; 2. Pembahasan Stimulus Ekonomi Sektor Transportasi Udara Periode Angkutan Lebaran Tahun 2026 pada tanggal 22 Januari 2026.
3.	Penguatan engagement dengan stakeholder (kehadiran aktif dalam forum koordinasi/ undangan)	Terlaksana	1. Diskusi awal rencana kolaborasi percepatan digitalisasi daerah dengan Direktorat Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital Komdigi pada tanggal 7 Januari 2026; 2. Pembahasan Usulan Penurunan Tarif Bea Masuk Suku Cadang Pesawat

			Terbang pada tanggal 19 Januari 2026;
			3. Koordinasi pemeliharaan dan optimalisasi pemanfaatan sistem (SIPD) melalui Surat kepada Kementerian Dalam Negeri perihal Dukungan Satgas P2DD untuk Penguatan SIPD pada Februari 2026;
			4. Koordinasi dalam rangka optimalisasi pemanfaatan data dari SIP2DD serta penguatan sinergi dalam mendukung implementasi P2DD.

Triwulan II			
4.	Pelaksanaan dan pelaporan Survei Kepuasan Kualitas Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Semester I	Terlaksana	Telah dilaksanakan dan pelaporan survei kepuasan layanan kepada stakeholders oleh masing-masing unit Eselon II
5.	Koordinasi debottlenecking isu-isu strategis BUMN	Terlaksana	1. Public Hearing Insentif PPN DTP Tiket Pesawat Dampak Kenaikan Avtur, 7 April 2026; 2. Rapat Pleno Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi Pada Periode Libur Sekolah Yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2026, 10 Juni 2026.
6.	Penguatan engagement dengan stakeholder (kehadiran aktif dalam forum koordinasi/ undangan)	Terlaksana	1. Koordinasi teknis dengan Komdigi terkait optimalisasi pemanfaatan sistem SIP2D dan penguatan fungsi aplikasi; 2. Koordinasi dalam rangka optimalisasi pemanfaatan data dari SIP2DD serta penguatan sinergi dalam mendukung implementasi P2DD.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan II Tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pemanfaatan google form sebagai instrumen kuesioner survei.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Hingga Triwulan II Tahun 2026, tidak ada kendala atau hambatan yang dihadapi

dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

7 Sasaran Program 7: Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Program 6: Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang Berkualitas ditunjukkan oleh indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

7.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN

Latar Belakang

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN merupakan persentasi pemenuhan bukti dukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN. Adapun komponen penilaian Reformasi Birokrasi di level Deputy didasarkan pada tingkat implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan/ atau Reformasi Birokrasi Tematik di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Implementasi kegiatan RB General dan/ atau Tematik harus didasarkan dan disesuaikan pada rencana aksi yang telah disusun pada awal tahun sebagaimana tertuang pada Peraturan Sekretaris Kementerian. Rencana Aksi Deputy terkait pemenuhan tingkat keberhasilan Zona Integritas, nilai SAKIP, dan tingkat digitalisasi arsip.

Berikut merupakan formulasi dalam menentukan persentase pelaksanaan rencana aksi RB Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN:

$$\text{Persentase Pelaksanaan RB} = \frac{\text{Total Renaksi RB yang Dilaksanakan}}{\text{Total Renaksi RB yang Dirumuskan}} \times 100\%$$

Pada tahun 2026, telah dirumuskan 11 Renaksi RB Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN dengan rincian sebagai berikut:

Renaksi TW I	Renaksi TW II	Renaksi TW III	Renaksi TW IV
1. Penyusunan dan Penetapan Perjanjian Kinerja	1. Penyusunan Rencana Aksi RB General dan RB Tematik	1. Pelaporan/Pemantauan/Pelaksanaan Rencana Aksi RB General dan RB Tematik	1. Fasilitasi Pembangunan ZI di Unit Kerja
2. Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan	2. Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan	2. Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan	2. Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan
3. Optimalisasi Pemanfaatan Srikandi	3. Optimalisasi Pemanfaatan Srikandi	3. Optimalisasi Pemanfaatan Srikandi	3. Penyusunan draft Perjanjian

	Kinerja tahun 2027
	4. Optimalisasi Pemanfaatan Srikandi

Hasil Pengukuran Kinerja

Untuk menghitung capaian kinerja pada Triwulan II, perlu diketahui pelaksanaan dari Rencana Aksi TW II sebagai berikut:

No	Rencana Aksi	Status
Triwulan I		
1.	Penyusunan dan Penetapan Perjanjian Kinerja	Terlaksana
2.	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan	Terlaksana
3.	Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI	Terlaksana
Triwulan II		
4.	Penyusunan Rencana Aksi RB General dan RB Tematik	Terlaksana
5.	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan	Terlaksana
6.	Optimalisasi Pemanfaatan Srikandi	Terlaksana

$$\text{Persentase Pelaksanaan RB} = \frac{6}{11} \times 100\% = 54,5\%$$

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW II	Realisasi	% Kinerja
7.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengelolaan BUMN	Persen	45	54,5	120

Pencapaian kinerja IKU Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengelolaan BUMN yang memenuhi target menunjukkan sasaran Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang Berkualitas tercapai. Tata kelola yang baik merupakan landasan penting bagi organisasi untuk mencapai visi, misi, dan tujuan yang diemban. Ketercapaian sasaran strategis ini akan secara signifikan mendorong terwujudnya pelaksanaan proses bisnis Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang berfokus pada sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan yang efektif. Dengan tata kelola yang baik, organisasi dapat mewujudkan birokrasi yang efisien, transparan, akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

6.1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengelolaan BUMN			
No	Rencana Aksi	Status	Keterangan
Triwulan I			
1.	Penyusunan dan Penetapan Perjanjian Kinerja	Terlaksana	Telah dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kinerja pada bulan Januari 2026
2.	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan	Terlaksana	Telah dilaksanakan pada bulan April 2026
3.	Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI	Terlaksana	Implementasi Srikandi dilakukan untuk administrasi pemberkasan surat masuk maupun keluar. Selain itu, pemberian disposisi juga menggunakan aplikasi Srikandi
Triwulan II			
4.	Penyusunan Rencana Aksi RB General dan RB Tematik	Terlaksana	Penyusunan Rencana Tindak Agen Perubahan
5.	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan	Terlaksana	Telah dilaksanakan pada bulan Juli 2026
6.	Optimalisasi Pemanfaatan Srikandi	Terlaksana	Implementasi Srikandi dilakukan untuk administrasi pemberkasan surat masuk maupun keluar. Selain itu, pemberian disposisi juga menggunakan aplikasi Srikandi

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya adalah:

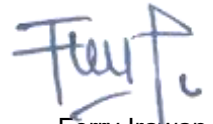
- Sebagian pelaksanaan koordinasi dilaksanakan secara *hybrid* menggunakan media komunikasi telekonferens (online), sehingga perjalanan dinas luar kota dilaksanakan selektif sesuai dengan urgensi.
- Pemberkasan administrasi persuratan sudah menggunakan aplikasi Srikandi dan media penyimpanan cloud sehingga sudah tidak memerlukan banyak peralatan ATK seperti kertas ataupun lemari untuk administrasi surat-surat tersebut.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Hingga Triwulan II Tahun 2026, tidak ada kendala atau hambatan yang dihadapi

dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Jakarta, 14 Juli 2026
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan
dan Pengembangan Usaha BUMN



Ferry Irawan